

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren sebagai model lembaga pendidikan Islam pertama yang mendukung kelangsungan sistem pendidikan nasional, selama ini tidak diragukan lagi kontribusinya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mencetak kader-kader intelektual yang siap untuk mengapresiasi potensi keilmuannya di masyarakat¹. Dalam perjalanan misi kependidikannya, pesantren mengalami banyak sekali hambatan yang sering kali membuat laju perjalanan ilmiah pesantren menjadi pasang surut.

Hal ini tidak terlepas dari peran dan ketokohan seorang Kyai sebagai pemegang otoritas utama dalam pengambilan setiap kebijakan pesantren. Sebagai seorang *top leader*, Kyai diharapkan mampu membawa pesantren untuk mencapai tujuannya dalam mentransformasikan nilai-nilai ilmiah (terutama ilmu keagamaan) terhadap umat (santri) sehingga nilai-nilai tersebut dapat mengilhami setiap kiprah santri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam sejarahnya di masa yang lalu, pesantren telah mampu mencetak kader-kader handal yang tidak hanya dikenal potensial, akan tetapi mereka

¹ Imam Tolkhah dan A. Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Akar Tradis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 49.

telah mampu mereproduksi potensi yang dimiliki menjadi sebuah keahlian yang layak jual. Seperti halnya di era pertama munculnya pesantren, yaitu pada masa kepemimpinan wali songo, pesantren telah mampu melahirkan kader-kader seperti Sunan Kudus (Fuqoha), Sunan Bonang (Seniman), Sunan Gunung Jati (Ahli Strategi Perang), Sunan Drajat (Ekonom), Raden Fatah (Politikus dan Negarawan), dan para wali yang lain². Mereka telah mampu menundukkan dominasi peradaban Majapahit yang telah berkuasa selama berabad-abad, yang dikenal sebagai suatu kerajaan dengan struktur pemerintahan dan pertahanan negara yang cukup disegani di kawasan Asia Tenggara.

Hal ini menjadi sangat logis sekali ketika hampir semua lembaga pendidikan di Indonesia termasuk sebagian pesantren yang mulai berlomba-lomba melakukan pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, pondok pesantren dalam perkembangannya menjelma sebagai lembaga sosial yang memberikan warna khas bagi perkembangan masyarakat sekitarnya. Peranan pesantren pun berubah menjadi agen pembaharuan (*agent of change*) dan agen pembangunan masyarakat. Sekalipun demikian tetap saja yang menjadi tujuan utama adalah memahami agama³.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Kata “tradisional” dalam batasan ini tidaklah merupakan

² Abd. A'la, *Pembaruan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hal. 17

³ He. Badri& Munawiroh, *Pergeseran Literatur Pesantren salafiah* (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2007), hal.23

dalam arti tetap tanpa mengalami penyesuaian atau sarat dengan ketertinggalan, tetapi menunjuk bahwa lembaga pesantren hidup sejak lama dan telah menjadi bagian yang mendalam dari sistem kehidupan sebagian umat Islam Indonesia yang merupakan golongan mayoritas bangsa Indonesia dan mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai dengan perjalanan hidup umat.

Menurut K.H.R. As'ad Syamsul Arifin, saat ini ternyata pesantren seolah sudah mulai kehilangan daya kekebalannya untuk membendung arus modernisasi dan westernisasi yang sudah mulai menggejala sejak pertengahan abad ke XX. Banyak sekali pesantren-pesantren salaf yang mulai merubah orientasi pendidikannya menjadi pola pendidikan kebarat-baratan. Menurut Kyai As'ad bukannya pesantren tidak boleh modern, akan tetapi semangat untuk mengakomodir tuntutan zaman (Modernisasi) haruslah disertai dengan konsistensi terhadap nilai-nilai yang dianut, yakni nilai-nilai *salafiyah*.⁴

Nilai-nilai *salafiyah* harus tetap menjadi prinsip sebagai benteng utama dalam menetralsisir aspek-aspek negatif yang ditimbulkan dari dampak modernisasi yang saat ini mulai mempopulerkan diri dalam ranah pendidikan di Indonesia termasuk lembaga pendidikan pesantren. Sehingga pesantren tidak dikatakan latah dan cenderung menjadi bulan-bulanan peradaban modern yang kandungan nilai-nilainya tidak kesemuanya sesuai dengan prinsip-prinsip salaf.

⁴As'ad Syamsul Arifin, *Percik-Percik Pemikiran Kiai Salaf-Wejangan Dari Balik Mimbar* (Situbondo: Bp2m P.P Salafiyah Syafiiyah, 2000), hal. 45.

Dari latar belakang inilah penulis mengangkat pemikiran Abdurrahman Wahid, karena dia terkenal sebagai tokoh yang berasal dari pesantren dan sebagai cucu dari KH. Hasyim Asy'ari yang dikenal sebagai tokoh Islam yang mempunyai peranan penting dalam kemajuan bangsa Indonesia dimasanya, melalui pesantren yang dibangunnya sebagai wujud perlawanan etik kaum Ulama dalam menentang penindasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada masa penjajahan dulu, dan menjadikan pondok pesantren mempunyai peran penting dalam proses modernitas dan interaksi antar bangsa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terlebih pesantren tidak saja memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis tapi yang lebih penting adalah menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Sehingga tujuan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, yang mampu mengakses segala aspek kehidupan dan berperadaban dapat terwujud. Hal ini sesuai dengan konsep pola kehidupan dalam perspektif sosiologis Ibnu Khaldun bahwa puncak dari pengembangan masyarakat adalah terwujudnya masyarakat madani dengan nilai-nilai peradaban yang tinggi, demokratisasi, inklusivisme, independen, makmur dan sejahtera⁵.

Menurut Abdurrahman Wahid pesantren bersifat dinamis, terbuka pada perubahan dan mampu menjadi penggerak perubahan yang diinginkan. Sejak orde baru melancarkan program pembangunan atau modernisasi (1970) dan mendapat dukungan hampir seluruh lapisan masyarakat mempengaruhi sebagian pesantren untuk semakin membuka diri dengan tantangan kehidupan

⁵ Wendy Melfa & Solihin Siddiq, *Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam Study Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Bandar Lampung: Matakata, 2006) hal.22

modern yang terjadi di lingkungan masyarakat⁶. Jika kita bicara tentang modernisasi, pasti jauh dari kebudayaan dan pranata tradisional. Sehingga kebudayaan dan gaya hidup tradisional yang dituduh dekaden dan tidak mungkin berubah dianggap sebagai penghalang besar bagi pembangunan sosio ekonomi. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan salah satu hal yang diupayakan adalah mengutuk, mengubah, bahkan menyingkirkan kebudayaan tradisional itu. Padahal tidak seperti itu, dalam melakukan perubahan kita tidak harus membuang suatu yang lama, tapi melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik dan sempurna.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Kata “tradisional” dalam batasan ini tidaklah merupakan dalam arti tetap tanpa mengalami penyesuaian atau sarat dengan ketertinggalan, tetapi menunjuk bahwa lembaga pesantren hidup sejak lama dan telah menjadi bagian yang mendalam dari sistem kehidupan sebagian umat Islam Indonesia yang merupakan golongan mayoritas bangsa Indonesia dan mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai dengan perjalanan hidup umat.

Mengingat umurnya yang sudah tua dan luas penyebaran pesantren cukup merata, dapat dipahami jika pengaruh lembaga ini pada masyarakat sekitar

⁶ Nur Kholis dkk, *Tarekat Pesantren dan Budaya Lokal* (Surabaya: Sunan Ampel Press Surabaya, 1999), hal. 89.

sangat besar. Sepanjang kelahirannya pesantren memberikan kontribusi yang sangat besar sebagai lembaga pendidikan, lembaga penyiaran agama dan juga gerakan sosial keagamaan kepada masyarakat. Apalagi sebagian besar pondok pesantren yang ada tersebar di wilayah pedesaan. Hal tersebut menjadikan lembaga ini memiliki posisi yang strategis dalam mengemban peran-peran pengembangan pendidikan maupun sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar. Terlebih lagi dewasa ini pondok pesantren telah mengalami berbagai pengembangan internal yang memungkinkan besarnya peluang pesantren untuk berperan menjadi agen pembangunan dalam rangka menjembatani dan memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat pedesaan.

B. Rumusan Masalah.

Sesuai latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, rumusan permasalahan pokok yang hendak diutarakan dalam buku ini adalah "*Konsep Pengembangan Masyarakat Islam dalam Konteks Modernisasi Pesantren Menurut Abdurrahman Wahid*". Rumusan permasalahan pokok tersebut selanjutnya akan dijabarkan lagi menjadi:

1. Bagaimana konsep pengembangan masyarakat Islam dalam modernisasi pesantren?
2. Bagaimana konsep modernisasi pesantren menurut Abdurrahman Wahid?

C. Tujuan Penelitian

Secara substansial tujuan dari penelitian adalah menyelesaikan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Maka dari perumusan itulah akan terdapat sesuatu yang menjadi rumusan dari hasil sebuah penelitian. Secara umum, karena objek penelitian adalah Penelitian pustaka mengenai "*konsep Pengembangan Masyarakat Islam dalam konteks Modernisasi Pesantren Menurut Abdurrahman Wahid*", maka dalam hal ini tujuan penelitian akan diarahkan pada ke-sesuaian antara tujuan dengan upaya pemecahan problematika yang telah dirumuskan. secara garis besar penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk berpartisipasi dalam pengembangan konseptual mengenai Pengembangan masyarakat Islam dalam konteks modernisasi pesantren.
2. Untuk mengetahui peran pesantren dalam proses pengembangan masyarakat Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut diatas, kajian ini diharapkan:

1. Dapat memperkaya khazanah teori keilmuan pengembangan masyarakat Islam, terutama yang berhubungan dengan pengembangan pesantren.
2. Dapat memperkaya pengetahuan mengenai strategi dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan pesantren.

3. Bermanfaat bagi agen pengembangan masyarakat dalam mengoptimalisasikan usaha pengembangan pesantren dan pemberdayaan pesantren yang berkualitas.

E. Konseptualisasi

Agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam pembahasan skripsi kali ini, maka peneliti memberikan definisi konsep yang ada. Sebab sebuah konsep merupakan unsur dari sebuah penelitian yang memiliki artian sebagai sebuah definisi singkat dari sejumlah fakta atau gejala-gejala yang ada. Maksud dari ditetapkannya konseptualisasi judul adalah untuk memberikan batasan makna dari kata-kata penting yang didasarkan pada konsentrasi keilmuan peneliti. Agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam mendefinisikan kata-kata dalam judul penelitian "*Konsep Pengembangan Masyarakat Islam dalam Konteks Modernisasi Pesantren menurut Abdurrahman Wahid*".

1. Pengembangan

Pengembangan, secara teknis istilah pengembangan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pemberdayaan bahkan dalam batas-batas tertentu bersifat *Interchangeable* atau dapat di pertukarkan. Menurut Nani Machendrawati, "Pengembangan adalah suatu proses, cara atau

perbuatan, pengembangan dan juga dapat berarti membina dan meningkatkan kualitas”⁷.

Sedangkan Pemberdayaan mengacu pada kata *empowerment* yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri. Jadi pendekatan pemberdayaan di titik beratkan pada penekanan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat dapat memposisikan diri mereka sendiri sebagai subyek bukan sebagai obyek.⁸

2. Masyarakat Islam

Pada dasarnya pembahasan tentang masyarakat Islam itu tidak terlepas dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat hidup terjaring suatu kebudayaan yang oleh manusia-manusia tadi dirasakan oleh satu kebudayaan. Sedangkan menurut Nani Machendrawati, “Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan pengaruh mempengaruhi satu sama lain”. Jadi masyarakat Islam adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan agama yakni agama Islam”.⁹

⁷ Nani Machendrawaty & agus A. Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi Strategi sampai tradisi* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2001), hal. 42.

⁸ Setiana, L. *Tehnik penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat*. (Bogor. Ghalia Indonesia, 2005) Hal:7

⁹ Nani Machendrawaty & agus A. Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi Strategi sampai tradisi* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2001), hal. 5.

Jadi pengembangan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (*Usrah*), keluarga sosial (*Jama'ah*) dan masyarakat (*Ummah*). Sedangkan Amrullah Ahmad menyebutkan pengembangan masyarakat Islam adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan dalam perspektif Islam¹⁰.

3. Modernisasi

Menurut Danile Lerner sebagaimana yang dikutip oleh Paresh Chattopadhyay mengemukakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan sosial melalui pembangunan dalam bidang ekonomi. Ini bermakna proses modernisasi berawal dari kepentingan untuk membangun ekonomi. Sedangkan menurut Abdurrahman Wahid dalam bukunya *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren* mengemukakan bahwa modernisasi merupakan proses pergantian nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru yang lebih sempurna.

4. Pesantren

Istilah pesantren berasal dari bahasa sansekerta yang kemudian memiliki arti tersendiri dalam bahasa Indonesia. Pesantren berasal dari kata santri yang diberi awalan *pe-* dan akhiran *-an* yang menunjukkan arti tempat,

¹⁰ Nanih Machendrawaty & agus A. Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi Strategi sampai tradisi*..... hal. 29.

jadi berarti tempat *santri*. Kata *santri* itu sendiri berarti gabungan dua suku kata yaitu *san* (manusia baik) dan *tra* (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan untuk membina manusia menjadi orang baik¹¹.

Dari segi terminologis Pesantren diberi pengertian oleh Mastuhu, adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari¹².

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari¹³.

Pesantren merupakan sekolah agama Islam yang menyediakan asrama bagi murid-muridnya yang dipimpin oleh seorang Ulama¹⁴.

Jadi modernisasi pesantren merupakan upaya pembaharuan pesantren. Modernisasi atau pembaharuan pesantren dilakukan dalam rangka peningkatan aktualisasi pengabdianya ditengah masyarakat¹⁵.

¹¹ Di kutip dari Abu Hamid, *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan, dalam agama Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hal. 328.

¹² Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994) hal. 55.

¹³ Rofiq RB. & Widodo, *Pemberdayaan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 34.

¹⁴ Greeg Barton, *Biografi Gus Dur* (Yogyakarta: LkiS, 2006), hal. 26

¹⁵ Imam Bawani, "Pola Modernisasi Pesantren di Indonesia" dalam M. Nadhim Zuhdi dkk (Ed), *Tarekat Pesantren Dan Budaya Lokal* (Surabaya : Sunan Ampel Surabaya Press, 1999), hal. 90.

Modernisasi pesantren merupakan proses perubahan pesantren kearah penyempurnaan keadaan.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan buku ini dibagi menjadi beberapa bagian dan subbagian, yaitu :

- Bab I Merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, konseptualisasi dan sistematika pembahasan.
- Bab II Tentang kerangka teoritik yang merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori yang digunakan Abdurrahman wahid dalam konsep Modernisasi pesantren yang mencakup, kajian pustaka dan kajian teoritik.
- Bab III Membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji obyek penelitian yang meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, unit analisis dan tahapan penelitian.
- Bab IV Merupakan penyajian data yang meliputi biografi Abdurrahman Wahid.
- Bab V Analisis data yang meliputi pembahasan tentang dinamisasi dan modernisasi pesantren.
- Bab VI Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran disertai dengan daftar kepustakaan.

BAB II

KERANGKA TEORETIK

A. Kajian pustaka

1. Prospek Pesantren

Secara teknis, pesantren adalah “tempat tinggal santri”. Pengertian tersebut menunjukkan ciri pesantren yang paling penting, yaitu sebuah lingkungan pendidikan yang sepenuhnya total. Pesantren mirip dengan akademi militer atau biara dalam hal pengalaman dan kemungkinannya untuk sebuah totalitas. Dibandingkan dengan lingkungan pendidikan parsial yang ditawarkan oleh sistem sekolah umum yang berlaku sebagai “struktur pendidikan secara umum” bagi bangsa, pesantren adalah sebuah kultur yang unik¹⁶. Keunikannya tersebut ditunjukkan melalui tiga unsur pokok yang membangun subkultural pesantren; pola kepemimpinannya yang berdiri sendiri dan berada di luar kepemimpinan pemerintahan desa, literatur universal yang telah dipelihara selama beberapa abad dan sistem nilainya sendiri yang terpisah dari sistem nilai yang dianut oleh masyarakat di luar pesantren. Berdasar pada ketiga unsur tersebut, tiap pesantren mengembangkan kurikulumnya sendiri dan menetapkan institusi-institusi pendidikannya sendiri dalam rangka meresponi tantangan-tantangan dari luar. Sebuah pola umum dari respon tersebut bisa dikenali, yaitu yang memberikan konteks historis bagi pesantren di Indonesia kontemporer.

¹⁶ Abdurrahman Wahid “Prospek Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan“, dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher (Ed), diterj. Shonhadji, *Dinamika Pesantren : Dampak Pesantren dalam pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, (Surabaya: Hikmah, 1995), hal.267.

Sebuah penyorotan terhadap konteks historis tersebut memberikan beberapa kemungkinan menarik tentang pengembangan pesantren menuju sebuah institusi yang lebih menarik. Sebuah riset lapangan yang tengah berlangsung tentang pandangan hidup ulama Indonesia mengindikasikan bahwa sebuah pola pandangan semesta (*world views*) dan sikap-sikap yang khas menjadi latar belakang bagi pendidikan pesantren. Hal ini memperlihatkan kebutuhan nyata akan perlakuan yang lebih utuh dan layak untuk saat ini terhadap pesantren. Kepemimpinan kyai dalam pesantren adalah unik dari segi kekukuhannya pada ciri-ciri pramodern, semisal pola hubungan antara pemimpin dan pengikut yang lebih berdasar pada sistem kepercayaan daripada hubungan patron-client pada masyarakat umumnya. Santri menerima kepemimpinan kyai karena kepercayaan pada masyarakat umumnya. Santri menerima kepemimpinan kyai karena kepercayaan mereka pada konsep barokah yang didasarkan pada doktrin emanasi kaum sufi. Akan tetapi pesantren bukan satu-satunya sumber dari diterimanya model tersebut. Model ini bisa ditemukan pula pada zaman sebelum Islam, yaitu hubungan riset (tidak dipublikasikan) yang dilakukan oleh Sydney Jones di Kediri beberapa tahun yang lalu menunjukkan bahwa di luar pesantren, kepemimpinan kyai berkembang menjadi sebuah hubungan patron-client yang sangat erat, dimana otoritas seorang kyai besar dari “pesantren induk” diterima otoritasnya di kawasan seluas propinsi, baik oleh para pejabat pemerintah, pemimpin politik maupun kaum hartawan. Ia menugaskan sebuah jaringan wakil-wakilnya yang rumit untuk

menghadapi berbagai golongan masyarakat yang berbeda-beda. Sebagai hasilnya adalah tipe-tipe kyai yang berbeda yang mengabdikan diri di pesantren yang sama, dengan kyai sebagai pemimpin tertinggi.

Aspek kepemimpinan kyai ini penting sebab ia menunjukkan bagaimana kyai memelihara hubungan sejawat (*peer-relationship*), baik dengan kepemimpinan masyarakat maupun dengan kyai lain. Aspek yang sangat penting dari peranan kyai ini seringkali luput dari perhatian dalam usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk memodernisasikan pesantren, yang karenanya harus menjadi titik perhatian kajian-kajian tentang pesantren di masa depan.

Unsur utama yang kedua, yaitu literatur universal yang dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi yang secara langsung berkaitan dengan konsep yang unik tentang kepemimpinan kyai. Kitab lama menciptakan kesinambungan “tradisi yang benar” dalam memelihara ilmu-ilmu agama sebagaimana yang diwariskan kepada masyarakat Islam oleh imam-imam besar di masa lalu. Hanya inilah jalan untuk mempertahankan ukuran-ukuran tertinggi untuk masa depan, dan hanya melalui cara ini pula komunitas Islam bisa memelihara kemurnian ajaran-ajaran agama. Peranan kitab lama yang lazim disebut dengan “kitab kuning” adalah untuk menyediakan akses bagi para santri, bukan hanya menuju warisan yuriprudensi atau jalan terang menuju kesadaran esoteris tertinggi tentang status kehambaan manusia (*ubudiyah*) di mata Tuhan, akan tetapi juga

untuk mengindikasikan peranan dalam kehidupan dan kesentausaan masyarakat di masa yang akan datang.

Unsur utama ketiga adalah sistem nilai kepesantrenan yang unik. Berdasarkan kepatuhan harfiah terhadap ajaran agama dalam menjalani kehidupan nyata, sistem nilai itu tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur utama lainnya yaitu kepemimpinan kyai dan literatur universal. Pembakuan ajaran-ajaran islam tentang kehidupan sehari-hari bagi kyai dan santri melegitimasikan dua hal yaitu kitab-kitab sebagai sumber tata nilai dan kepemimpinan kyai sebagai model dari implementasinya dalam kehidupan nyata sebagai jalur utama dari sistem nilai. Sistem nilai itu memainkan peranan penting dalam membentuk kerangka kemasyarakatan dari keinginan warga pesantren terhadap masyarakat pada umumnya.

Pada masa lalu, pesantren di indonesia telah dengan sukses merespon tantangan-tantangan eskternal. Pesantren indonesia memperlihatkan sebuah kemampuan unik untuk memberikan respin dengan cara yang lebih rumit ketimbang sekedar penolakan begitu saja terhadap sistem sekolah. Pada tahun duapuluhan, pesantren mulai membuat percobaan dengan sekolah agama yang eksklusif. Tahun-tahun tigapuluhan mulai terlihat kurikulum campuran dalam sekolah tersebut dan mencapai puncaknya ketika sekolah-sekolah negeri muncul di dalam pesantren pada tahun-tahun enampuluhan dan tujuh puluhan. Pada waktu yang sama berbagai eksperimen secara terpisah-pisah memasukkan sekolah umum, di mana pengajaran agama diberikan pada sebuah basis ekstra-kurikuler murni, telah muncul dalam

sebuah jaringan yang terus meluas di banyak tempat di Jawa. Sebagai contoh, di Banyumas Selatan, banyak sekolah agama dengan kurikulum campuran telah mentransformasikan diri ke dalam sekolah-sekolah yang hampir murni merupakan sekolah umum di sebabkan oleh tuntutan masyarakat terhadap sekolah model demikian. Perlu kajian serius lebih jauh tentang akibat-akibat dari situasi ini di masa depan terhadap pendidikan agama di Indonesia.

Di pihak lain, usaha coba-coba untuk mendorong pesantren agar membina diri sebagai “basis bagi upaya pengembangan pedesaan dan masyarakat” yang dimulai pada awal-awal tahun tujuh puluhan yang pada saat ini telah berkembang menjadi sebuah usaha keras dan besar-besarn untuk transformasi sosial, telah dimulai oleh pesantren sendiri.

Pesantren yang berperan sebagai pelopor transformasi sosial perlu menggunakan beberapa strategi antara lain strategi sosial-politik, kultural dan sosial kultural¹⁷. Strategi sosio-politik menekankan perlunya merinci butir-butir pokok dari formalisasi ajaran Islam di dalam lembaga negara melalui upaya legal formalistis yang terus-menerus oleh gerakan-gerakan Islam, terutama melalui sebuah partai yang secara eksplisit menyatakan diri sebagai partai Islam atau sebuah partai politik eksklusif khusus umat Islam. Termasuk dalam strategi ini adalah tahap berikutnya yaitu keharusan adanya kontrol terhadap aparat pemerintah oleh kaum Muslimin. Untuk mengantisipasi tercapainya tahap ini, umat Islam harus mendidik diri sendiri

¹⁷ Sahal Mahfudz “Prospek Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan” dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher (Ed), diterj. Shonhadji, *Dinamika Pesantren : Dampak Pesantren dalam pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, (Surabaya: Hikmah, 1995), hal.268.

dengan moralitas islam yang benar dan mengembangkan jalan hidup islami baik untuk individu maupun masyarakat.

Strategi kultural dirancang untuk kematangan kepribadian kaum muslimin dengan meluaskan cakrawala mereka, memperluaskan cakupan komitmen mereka, memperdalam kesadaran mereka tentang kompleksnya lingkungan manusia dan memperkuat solidaritas dengan sesama manusia tanpa memandang latar belakang ideologi politik, kesukuan dan kultural maupun agama mereka. Cara mencapai tujuan-tujuan ini adalah dengan sepenuhnya mengembangkan sikap rasional kaum muslimin terhadap kehidupan.

Strategi sosio-politik melihat perlunya mengembangkan kerangka kemasyarakatan yang mempergunakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Kerangka kemasyarakatan yang dikembangkan oleh kaum muslimin mesti serupa dengan apa yang dikembangkan oleh orang lain “Kebiasaan” ini harus mencerminkan keinginan masyarakat untuk melakukan sendiri transformasi yang fundamental. Strategi ini bercita-cita membangun sebuah komunitas yang menjunjung tinggi hukum, kebebasan dari tekanan, kerangka kenegaraan yang demokratis, pembagian kekayaan negara yang adil dan sebagainya.

2. Khittah dan Penguatan Civil society di Indonesia

Muhammad As Hikam dalam tulisannya yang berjudul Khittah dan Penguatan Civil Society di Indonesia, menuliskan bahwa Gus Dur yang dikenal sebagai tokoh besar NU berharap NU akan berbuat banyak dalam

pengembangan dan pengokohan civil society yang mandiri sebagai wahana demokratisasi yang semakin hari semakin menjadi tuntutan rakyat.

Kenyataan bahwa basis massa NU mayoritas berada pada lapisan bawah dan masih belum sepenuhnya terlepas dari persoalan-persoalan dasar seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, jaminan hak-hak dasar peningkatan pendidikan dan taraf hidup. Sebenarnya NU merupakan salah satu organisasi yang paling berpotensi dalam gerakan-gerakan yang diarahkan bagi pembebasan rakyat dari jeratan keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Tetapi penggarapan pemecahan masalah – masalah krusial tersebut masih tertinggal dibanding organisasi Islam lain seperti Muhammadiyah, sehingga tercipta citra negatif bahwa NU adalah organisasi tradisional yang tidak berhasil menjawab tantangan modernitas dan memperjuangkan kepentingan umat.

Apabila NU ingin berperan aktif agen perubahan sosio-kultural dalam masyarakat diperlukan keberanian melakukan perubahan fundamental. Prinsip-prinsip *Mabni Khaira Ummah, Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, harus dijabarkan dan dirumuskan melampaui pemahaman konvensional. Gus Dur, misalnya, menyerukan diperluasnya wilayah garapan konsep Amar Ma'ruf dengan memberikan penekanan pada aspek-aspek kehidupan yang biasanya dianggap "diluar" kepentingan agama. Dengan demikian kepentingan pemahaman konsep Amar Ma'ruf perlu ditinjau kembali. Ia

lantas dimengerti dalam konteks kepentingan kemasyarakatan luas dan bukan hanya umat Islam saja.¹⁸

Dengan memperlebar wilayah garapan NU, maka kesempatan untuk berpartisipasi dalam kiprah advokasi masyarakat bawah dalam skala makro akan terbuka. NU bisa lebih berperan aktif dalam berbagai kerja penyadaran masyarakat arus bawah tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, dan membangkitkan kemampuan rakyat untuk semakin mandiri secara ekonomi dan percaya diri (*Self-Confidence*) terhadap kemampuannya melakukan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Demikian pula wilayah garapan NU secara tradisional, yaitu pesantren dan lembaga pendidikan lainnya akan mendapat perhatian yang lebih besar dengan orientasi baru ini. Persoalannya adalah bagaimana pesantren dan lembaga pendidikan yang dimiliki mampu menjaga relevansinya dalam proses modernisasi dan pada saat yang sama memperbesar kontribusinya bagi kepentingan masyarakat luas.

B. Kajian Teoritik

Modernisasi pesantren merupakan proses perubahan pesantren kearah penyempurnaan keadaan. Kata modernisasi sebenarnya masuk dalam kandungan kata Dinamisasi. Yang mana dinamisasi pada dasarnya mencakup dua buah proses, yaitu penggalan kembali nilai-nilai hidup positif yang

¹⁸ Muhammad AS Hikam “Khittah Dan Penguatan Civil Society Di Indonesia“ dalam Ellyasa K.H Dharwis (Ed), *Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta : LKis, 1997), hal. 157.

telah ada, selain mencakup pula pergantian nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru yang dianggap lebih sempurna. Proses pergantian nilai itulah yang disebut Modernisasi¹⁹.

Sejak Indonesia melaksanakan gerakan pembangunan atau disebut dengan modernisasi, pesantren mulai menghadapi situasi rasa yang tak menentu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Manifestasi umum pesantren dari keadaan ini tampak pada dua reaksi terhadap nilai-nilai kehidupan yang berada pada masa transisi dewasa ini. Reaksi pertama berbentuk menutup diri dari perkembangan umum masyarakat luar, terutama dari kegiatan yang mengancam kemurnian kehidupan beragama. Isolasi ini dilakukan begitu rupa sehingga pertukaran pikiran yang berarti dengan dunia luar, praktis terhenti sama sekali. Pesantren dan reaksi kedua adalah justru memperkuat penciptaan solidaritas (*solidarity making*) yang kuat antara pesantren dan masyarakat, dengan cara mengadakan upacara besar-besaran (pengajian umum) padahal mereka mempunyai dana yang sangat terbatas dan ternyata tidak dipergunakan secara bijaksana, melainkan untuk kegiatan – kegiatan perayaan saja.

Melihat keadaan situasi seperti ini, Abdurrahman Wahid dalam bukunya yang berjudul *Menggerakkan Tradisi Esai-esai Pesantren*, menunjukkan strategi dasar yang harus ditempuh dalam menyusun sebuah konsep perbaikan keadaan pesantren melalui penggerakan proyek-proyek perbaikan yang bersikap selektif dan bertahap..

¹⁹ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai Esai Pesantren*, (Yogyakarta : LkiS, 2001), hal. 53.

Pemberdayaan mengacu pada kata *empowerment* yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri. Jadi pendekatan pemberdayaan di titik beratkan pada penekanan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat dapat memposisikan diri mereka sendiri sebagai subyek bukan sebagai obyek.²⁰

Dalam pemberdayaan masyarakat hal yang paling diutamakan yakni dapat memposisikan individu sebagai subyek dalam membangun diri dan masyarakatnya, maka pemberdayaan masyarakat semestinya dilaksanakan dengan mengacu kepada karakteristik sasaran yang diberdayakan sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri khusus, latar belakang, budaya tertentu, ideologi dan paham tertentu, kepribadian tertentu dan seterusnya. Disebabkan perbedaan karakteristik yang dimiliki masyarakat, sasaran inilah yang menjadi upaya dalam pemberdayaan masyarakat bisa berbeda-beda antara masyarakat satu dengan yang lain.

Ketika dalam melakukan pemberdayaan masyarakat kurang memperhatikan karakteristik lokal, akan sulitlah mensapai tujuan dari pemberdayaan yang telah dicanangkan. Diawali dengan adanya kualitas SDM, kemudian diarahkan kepada pengembangan intelektual, kesadaran baik dalam beribadah maupun berhubungan dengan makhluk sosial lainnya.

²⁰ Setiana, L. *Tehnik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005) Hal:7

Mengacu kepada Al-Qur'an surat Al-Ma'un (107:1-3) yang artinya taukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Machendra dan Syafi'i menyatakan bahwa Islam adalah agama pemberdayaan, disamping sebagai agama gerakan atau perubahan berdasarkan QS Al-Ra'du(13:11) yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal shaleh, dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Yang menjadi sasaran individualnya yaitu setiap individu muslim, dengan orietasisumber daya manusia. Sasaran komunal adalah kelompok atau komunitas muslim, dengan orientasi pengembangan system masyarakat. Dan sasaran institusionalnya adalah organisasi pengembangan kualitas dan Islamitas kelembagaan.²¹

Sejak ditetapkannya manusia sebagai khalifah Allah (QS Al-Baqarah; 2:30) yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat "sesungguhnya aku hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" "Tuhan berfirman "sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". Berarti manusia diangkat sebagai pembangun dunia ciptaan Allah, untuk melaksanakan ini manusia dibekali dengan potensi ketuhanan (sebagai potensi pencipta yang serba maha) sebagai mana diisyaratkan QS AT-Tin (98:4) yang artinya "sesunggghnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya". Ketika manusia mampu melaksanakan fungsi

²¹ Nanih Machendrawaty, & Agus A safei, *pengembangan masyarakat Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hal. 41

kekaryaannya Allah berarti dia adalah khalifah, sebaliknya jika tidak berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap Allah yang berarti berkhianat terhadap diri sendiri (meniadakan potensi diri) juga berkhianat terhadap sesama makhluk (tempat melakukan kekaryaannya). Predikat yang disandangkan Allah kepada mereka antara lain adalah 'pendusta agama' (QS. Al-Ma'un; 107:1) 'anjing' (QS. Al-A'raf) dan binatang ternak (QS. Al-A'raf 7:179). Ditegaskan oleh Allah bahwa sehebat apapun manusia berkuasa dan berkarya, manusia tetap ciptaan Allah dengan segala keterbatasan makhluk, oleh sebab itu prinsip 'tauhid' harus menjadi *mainstream* bagi orang yang beriman dalam melakukan pengabdian (ibadah), dan kekaryaannya (*khilafah* dalam bermuamalah).²²

Pesantren memiliki dua potensi besar yaitu potensi pendidikan dan pengembangan masyarakat. Menurut KH. Sahal Mahfudz mengemukakan kalau pesantren ingin berhasil sumber daya manusia yang salah satu dimensinya adalah pengembangan semua sumber daya, maka pesantren harus melengkapi dirinya dengan tenaga yang terampil mengelola sumber daya yang ada dari lingkungan, disamping syarat lain yang diperlukan untuk berhasilnya sumber daya manusia, sudah barang tentu pesantren harus tetap menjaga potensinya sebagai lembaga pendidikan²³.

Masih banyak pesantren yang menjalankan sistem pendidikan salafi/tradisional dan konvensional dengan membatasi diri pada pengajaran kitab-kitab klasik dan pembinaan moral keagamaan semata, mereka memang unggul dalam melahirkan santri yang memiliki keshalihan, kemandirian (tidak terlalu tergantung pada peluang kerja pemerintah) serta kecakapan dalam penguasaan ilmu ke-Islaman, tetapi dalam persaingan di era modern

²² Nurjannah, *kesehatan mental*. Hand out matakuliah. (Yogyakarta: Fak Dakwah UIN suka, 2005), hal. 6

²³ Sahal Mahfudz "Pengembangan Masyarakat Pesantren : Antara Fungsi dan Tantangan" dalam Mnfred Oepen dan Wolfgang Karcher (Ed), diterj. Shonhadji, *Dinamika Pesantren : Dampak Pesantren dalam pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, (Surabaya: Hikmah, 1995), hal.101.

ini, tuntutan kehidupan global menghendaki kualitas sumber daya manusia terdidik di bidangnya. Realitas output pesantren yang memiliki sumber daya manusia kurang kompetitif inilah yang kerap menjadikannya termarginalisasi dan kalah bersaing dengan output pendidikan formal baik agama maupun umum.

Pernyataan di atas sesuai dengan pemikiran pengembangan masyarakat menurut Abdurrahman Wahid bahwa untuk mencapai pengembangan masyarakat secara umum harus dimulai dari pengembangan individu dengan cara mengembangkan sumber daya manusia. Dan disinilah peran pesantren sangat dibutuhkan, dimana pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai legitimasi tradisional, yang menjadikannya sebagai simbol budaya dan sarana yang efektif untuk menggerakkan perubahan. Jadi sebagai penggerak perubahan maka lebih dulu pesantren harus melakukan perubahan dalam diri lembaganya.

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang tumbuh secara murni dari kalangan muslim di Indonesia, pesantren memiliki kemungkinan sangat besar untuk terlibat dalam proses perubahan dari waktu ke waktu, termasuk kaitannya dengan gerak modernisasi dewasa ini. Setidaknya demikianlah menurut kemungkinan teoritisnya, mengingat dalam kemandirian penuhnya ditengah berbagai jenis lembaga pendidikan yang lain pesantren tidak terikat dengan tata aturan yang ketat dalam orbit birokrasi pemerintahan, sehingga untuk mengubah dan memperbarui segala hal yang dipandang penting dalam

rangka menyahtui kebutuhan riil masyarakat dan kemajuan zaman, pada hakikatnya tidaklah mengalami kesulitan.

Realitas pesantren sekarang ini, kendati pun sering dikategorikan sebagai lembaga pendidikan tradisional, akan tetapi sesungguhnya terus tumbuh dengan perubahan internal yang sangat berarti namun bervariasi antara satu dengan yang lain karena pesantren pada kenyataannya terus mengalami pertumbuhan dan perubahan internal. Maka upaya untuk menelaah keterkaitannya dengan kemungkinan gerak modernisasi, termasuk pencarian pola umum yang terjadi padanya sebagaimana yang dimaksud tulisan ini, adalah sesuatu yang patut dipertimbangkan.

Keberadaan pesantren dengan sejumlah tantangannya dewasa ini, sekaligus juga ada celah-celah peluang yang sangat penting untuk dicermati pemanfaatannya. Tantangan pesantren ini di era modern kurang lebih adalah sama dengan tantangan yang dihadapi Islam terhadap dominasi pola kehidupan barat. Tantangan tersebut harus diupayakan cara-cara terbaik, mesti dicari alternatif lain, misalnya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin peluang-peluang yang tampaknya juga tersedia bagi pesantren ditengah kehidupan modern.

Apabila peluang tersebut berhasil dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka akan melahirkan potensi besar dalam wujud akumulasi sumber daya manusia yang mampu berperan konstruktif pada kehidupan modern. Maka berarti pemanfaatan peluang itu adalah dalam rangka membangun kekuatan untuk menghadapi tantangan.

1. Profil Pesantren

Sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, pesantren telah melalui berbagai peradaban hingga sampai pada zaman modern di abad 21 saat ini. Sebagai lembaga yang bergerak dalam hal keilmuan khususnya ilmu agama, pesantren telah menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang tetap kokoh dalam berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadits, dan Qoul Ulama (yang terepresentasikan dalam kitab kuning). Oleh karena itu pesantren memiliki nilai-nilai yang tidak sama dengan lembaga pendidikan lainnya.

Untuk mendukung kelangsungan pesantren, berikut akan dijelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan pesantren, terutama mengenai unsur-unsur, fungsi, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri pesantren, sebagai berikut:

a. Sejarah dan Perkembangan Pesantren

Dilihat dari asal usulnya, ada dua pendapat mengenai asal usul pesantren. *Pendapat Pertama* mengatakan, bahwa pesantren berasal dari tradisi pra Islam. Sementara *Pendapat Kedua* mengatakan, bahwa pesantren adalah model pendidikan yang berasal dari tradisi Islam.

Sementara Tolkhah dan Barizi juga menyebutkan dua pendapat tentang munculnya pesantren. *Pertama*, pesantren ada sejak abad XVI M yang

ditandai dengan adanya karya-karya Jawa klasik seperti *Serat Cebolek*, dan *Serat Centini* yang mengungkapkan bahwa sejak abad ke XVI M di Indonesia telah banyak dijumpai beberapa lembaga yang mengajarkan berbagai kitab Islam klasik dalam bidang fiqh, aqidah, tasawuf, dan menjadi pusat-pusat penyiaran Islam.

Pendapat *kedua* menyatakan, bahwa pesantren muncul sebagai perdikana sistem pendidikan Hindu Budha pada abad ke XVIII M dan mengalami perkembangan secara independen pada abad ke XIX M, dan sejak abad ke XX M model pendidikan pesantren mulai dilakukan pembaruan diberbagai segi sebagai konsekuensi dari globalisasi dan bahkan dewasa ini pesantren mulai dilirik sebagai lembaga pendidikan alternatif bagi pembangunan bangsa kedepan²⁴.

Istilah pesantren memang bukan berasal dari Arab tapi istilah pondok berasal dari Arab; yaitu *funduk* yang berarti pesanggrahan atau penginapan bagi orang yang bepergian. Agaknya terlalu simplistis kalau istilah yang bukan berasal dari Arab, lalu dikatakan bukan berasal dari Islam seperti pesantren ini. Pesantren merupakan lembaga keagamaan yang sarat nilai dan tradisi luhur. perjalan sejarahnya secara potensial, karakteristik tersebut memiliki peluang cukup besar untuk dijadikan dasar pijakan dalam menyikapi arus globalisasi dan persoalan-persoalan

²⁴ Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Akar Tradisi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004),hal. 52

lainnya yang menghadang pesantren secara khusus, dan masyarakat luas secara umum.

Persoalan kian menjadi rumit ketika globalisasi telah menjadi realitas keseharian yang melekat dan harus dihadapi umat manusia, termasuk pesantren dan masyarakat di negeri ini. Terlepas dari mimpi-mimpi indah yang ditawarkannya, globalisasi telah mampu menampilkan dirinya dalam bentuk kolonialisme berwajah baru.

Secara ekonomi, ia merujuk pada re-organisasi sarana-sarana produksi, penetrasi industri lintas negara, perluasan pasar uang, jajahan barang-barang konsumsi, bursa tenaga kerja, dan penggusuran pemukiman penduduk secara besar-besaran.²⁵

Pesantren dengan teologi yang dianutnya ditantang untuk menyikapi globalisasi secara kritis dan bijak. Pesantren harus mampu mencari solusi yang benar-benar mencerahkan. Sehingga, pada satu sisi, dapat menumbuhkembangkan kaum santri yang memiliki wawasan luas yang tidak gamang menghadapi modernitas dan sekaligus tidak kehilangan identitas dan menjadi dirinya. Dan pada sisi yang lain pesantren dapat mengantarkan masyarakat menjadi komunitas yang sadar akan persoalan yang dihadapi dan mampu mengatasinya dengan penuh kemandirian dan keadaban.

²⁵ Abd. A'la, *Perubahan Pesantren*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2006), hal. 7

Disatu sisi, perkembangan ini akan bernilai positif, karena kebutuhan santri terhadap lembaga pendidikan formal akan terpenuhi. Sementara disisi yang lain, identitas pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan dan mengembangkan ilmu-ilmu agama akan tenggelam. Hal ini disebabkan nilai-nilai pendidikan yang ditawarkan pesantren akan lebih terfokus pada lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada, mengingat tuntutan kebutuhan pasar lebih cenderung pada legalitas formal yang disediakan oleh lembaga pendidikan formal secara umum.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam sejatinya harus menjadi sumber kearifan dan memiliki daya resistensi tinggi terhadap segala proses pemudaran nilai-nilai moral lambat laun mulai terperangkap kedalam kehidupan yang dehumanistik, yang berlawanan dengan sifat manusia yang fitri.

Eksistensi pendidikan pondok pesantren di era modern ini, harus berdasar pada tiga hal. *Pertama*, pesantren harus benar-benar menjadi pusat *tafaqquh fiddin*. *Kedua*, pesantren harus menjadi pusat lembaga pendidikan dan pengembangan IPTEK, dengan cara meningkatkan apresiasi dan SDM para santri terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. *Ketiga*, pesantren harus menjadi pusat dakwah dan pengembangan masyarakat baik dalam konteks nasional maupun global.

b. Unsur-Unsur Pesantren

Pondok, masjid, santri, kitab kuning, dan Kyai merupakan lima dasar dari tradisi pesantren. Ini berarti bahwa suatu lembaga pendidikan keagamaan yang telah berkembang hingga memiliki kelima elemen tersebut, akan disebut sebagai pesantren. Yang pembahasannya sebagai berikut:

- 1) Pondok. Pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para santri tinggal bersama dan belajar bersama dibawah asuhan Kyai. Asrama tersebut biasanya berada dalam lingkungan kompleks pesantren.
- 2) Masjid. Merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dengan pesantren. Masjid juga dianggap sebagai tempat yang tepat untuk mendidik para santri dalam beribadah dan memperdalam ilmu agama.
- 3) Santri. Merupakan elemen penting dalam kelangsungan pesantren. Biasanya santri terbagi atas santri mukim (santri yang menetap di asrama pesantren) dan santri kalong (santri yang berasal dari desa di tempat pesantren berada, mereka tidak menetap di asrama).
- 4) Kitab Kuning/Kitab Klasik. Kitab-kitab yang diajarkan di pesantren tergolong kedalam: Nahwu dan Sharaf, Fiqh, Ushul Fiqh, Hadits, Tafsir, Tauhid, Tasawuf dan Etika, Tarikh dan juga

Balaghah. Kitab kitab ini adalah materi pokok dalam kurikulum pesantren.

- 5) Kyai. Dalam kosa-kata Jawa, gelar Kyai dipakai untuk tiga jenis yang berbeda. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, misalnya Kyai Garuda Kencana, sebutan kereta emas yang ada di keraton yogyakarta. Sebagai gelar kehormatan untuk orang tua pada umumnya. Umumnya gelar Kyai dilekatkan pada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren, dan mengajar kitab-kitab klasik. Selain itu gelar Kyai juga dipakai untuk sebutan orang yang alim (orang yang sangat luas pengetahuan keagamaannya).²⁶

2. Fungsi Pesantren

Azyumardi Azra menawarkan tiga fungsi pesantren, yaitu:

1. Transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam.
2. Pemeliharaan tradisi Islam
3. Reproduksi ulama

Sebagai lembaga sosial pesantren telah menyelenggarakan pendidikan formal baik sekolah agama (madrasah) ataupun sekolah umum.

Disamping itu, pesantren juga menyelenggarakan pendidikan non formal

²⁶ Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren-Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES,1994), hal. 44

berupa madrasah diniyah yang mengajarkan materi keagamaan, selain itu pesantren juga mengadakan forum kajian keIslaman yang terkonsentrasi pada kajian kitab kuning dengan berbagai disiplin ilmu agama yang telah disebutkan diatas.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan diatas, pesantren mampu menampilkan eksistensinya sebagai lembaga solidaritas sosial dengan menampung santri dari berbagai lapisan masyarakat muslim dan memberikan pelayanan yang sama kepada mereka, tanpa membedakan latar belakang ataupun tingkat sosial ekonomi mereka.

Disamping itu, kharisma seorang Kyai pesantren juga mampu menjadi figur yang cukup efektif dalam perannya sebagai perekat hubungan dan pengayom masyarakat, baik pada tingkat lokal sampai nasional. Para Kyai juga sering mengadakan majelis taklim yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, baik yang diadakan atas inisiatif pesantren juga seringkali berasal dari inisiatif masyarakat.

Dengan berbagai peran potensial yang dimainkan pesantren, dapat dikemukakan bahwa pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya, sekaligus menjadi rujukan atas berbagai persoalan masyarakat. Fungsi-fungsi ini akan tetap terpelihara dan efektif manakala para Kyai pesantren dapat menjaga independensinya dari berbagai intervensi di luar pesantren.

Fungsi pesantren telah mengalami berbagai perkembangan. Visi, posisi, dan persepsinya terhadap dunia luar telah berubah. Pesantren pada pertamanya (masa wali songo) berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam. Kedua fungsi ini bergerak saling menunjang. Pendidikan dapat dijadikan bekal dalam memngumandangkan dakwah, sedangkan dakwah bisa dimanfaatkan sebagai sarana dalam membangun sistem pendidikan.²⁷

Dengan kata lain, sebenarnya fungsi edukatif pesantren pada masa wali songo adalah sekedar membawa misi dakwah. Misi dakwah Islamiyah inilah yang mengakibatkan terbangunnya sistem pendidikan. Pada masa wali songo muatan dakwah lebih dominan daripada muatan edukatif. Karena pada masa tersebut produk pesantren lebih diarahkan pada kaderisasi ulama dan muballigh yang militan dalam menyiarkan ajaran Islam.

Sebagai lembaga dakwah, pesantren berusaha mendekati masyarakat. Pesantren bekerja sama dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Sejak awal, pesantren terlibat aktif dalam mobilisasi pembangunan sosial masyarakat. Warga pesantren telah terlatih melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga

²⁷ Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal.22.

terjalin hubungan yang harmonis antara santri dan masyarakat, ataupun antara Kyai dan pemuka desa.

A. Wahid Zaini menegaskan, bahwa disamping lembaga pendidikan, pesantren juga sebagai lembaga pembinaan moral baik dikalangan santri maupun masyarakat. Kedudukan ini memberi isyarat bahwa penyelenggaraan keadilan sosial melalui pesantren lebih banyak menggunakan pendekatan kultural.²⁸

Pesantren juga berperan dalam berbagai bidang lainnya secara multidimensional, sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saja dalam kapasitas tradisionalnya, pesantren sering diidentifikasi memiliki tiga peran dalam masyarakat Indonesia; sebagai pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu Islam tradisional, sebagai penjaga dan pemelihara keberlangsungan Islam tradisional, dan sebagai pusat reproduksi ulama. Namun dalam realitasnya, pesantren mampu menunjukkan dirinya yang betul-betul eksis dalam setiap problematika sosial masyarakat.

3. Tujuan Pesantren

Tujuan pesantren sebagai berikut; Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-

²⁸ Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, hal.23.

ajaran agama Islam, dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupan. Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlaq mulia, memiliki kecerdasan, berketerampilan, serta sehat lahir dan batin.
- b. Mendidik santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama dan muballigh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara utuh dan dinamis.
- c. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggungjawab kepada pembangunan bangsa dan negara.
- d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (masyarakat dan lingkungannya).
- e. Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental spiritual.
- f. Mendidik santri untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam rangka usaha pembangunan bangsa.

Tujuan pendidikan pesantren adalah untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlaq mulia, bermanfaat dan berkhidmat

²⁹ Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi.....* hal. 6.

pada masyarakat, dengan cara menjadi abdi masyarakat. Sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Tujuan pendidikan pesantren juga diarahkan pada pengkaderan ulama yang mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam berkepribadian, menyebarkan agama, menegakkan kejayaan Islam dan umat ditengah-tengah masyarakat (*Izzul Islam wa al-Muslimin*), serta mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian manusia. Dari beberapa tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pesantren adalah membentuk kepribadian muslim yang menguasai ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya, sehingga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

4. Prinsip-Prinsip Pesantren

Komunitas keagamaan pesantren dilandasi oleh keinginan ber-*tafaqquh fiddin* (mendalami/mengkaji agama) dengan kaidah:” *Al-Muhafazhatu Ala al-Qadim as-Shalih, wal Akhdzu bil-Jadid al-Ashlah*” (Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik).

Keinginan dan kaidah ini merupakan nilai pokok yang melandasi kehidupan dunia pesantren. Dan menjadi acuan yang cukup kuat di dalam kultur pesantren, dan sekaligus menjadi pegangan bagi upaya-upaya

pembaharuan yang dilakukan oleh masyarakat santri yang tersebar di Indonesia.³⁰

- a. *Keikhlasan*. Yaitu, jiwa kepesantrenan yang tidak didorong oleh ambisi apapun untuk memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu, khususnya secara material, melainkan semata-mata karena beribadah kepada Allah.
- b. *Kesederhanaan*. Kata *sederhana* disini bukan berarti pasif, melarat, miskin, dan menerima apa adanya, tetapi mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati, kemampuan mengendalikan diri, dan kemampuan menguasai diri dalam setiap kesulitan. Dibalik jiwa kesederhanaan ini tersimpan jiwa yang besar, berani, maju, dan pantang menyerah dalam menghadapi dinamika sosial secara kompetitif.
- c. *Kemandirian*. Kemandirian disini bukanlah kemampuan dalam mengurus persoalan-persoalan internal pesantren, tetapi kesanggupan membentuk kondisi pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang merdeka dan tidak menggantungkan diri kepada bantuan dan pamrih dari pihak lain. Pesantren dibangun diatas pondasi kekuatan sendiri sehingga ia merdeka, otonom dan mandiri.
- d. *Bebas*. Jiwa yang bebas ini mengandaikan civitas sebagai manusia yang kokoh dalam memilih jalan hidup dan masa depannya dengan jiwa besar dan sikap optimis menghadapi segala problematika kehidupan dengan nilai-nilai Islam. Kebebasan disini juga berarti sikap kemandirian yang

³⁰ Yusuf Hasyim "Peranan Dan Potensi Pesantren dalam Pembangunan" dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher (Ed), Diterj. Shonhadji, *Dinamika pesantren Dampak Pesantren dalam Pendidikan dan pengembangan Masyarakat*, (Surabaya : Hikmah Surabaya, 1995), hal. 93.

tidak berkenan didekte oleh pihak luar dalam membangun orientasi sistem kepesantrenan dan kependidikan.

- e. *Ukhuwah Islamiyah*. Merupakan manifestasi dalam keseharian civitas pesantren yang bersifat dialogis, penuh keakraban, penuh kompromi, dan toleransi. Jiwa ini memotori suasana damai, sejuk, senasib, saling membantu, dan saling menghargai bahkan saling memberi *support* dalam pembentukan dan pengembangan idealisme santri.

5. Ciri-Ciri Pesantren

Ciri-ciri pesantren yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai *salafiyah* dapat di definisikan sebagai berikut³¹ :

- a. Adanya hubungan yang akrab antara santri dengan Kyainya. Kyai sangat memperhatikan santrinya. Hal ini memungkinkan karena tinggal dalam satu kompleks dan sering bertemu baik disaat belajar maupun dalam pergaulan sehari-hari. Bahkan sebagian santri diminta menjadi asisten Kyai (*Khadam*).
- b. Kepatuhan santri kepada Kyai. Para santri menganggap bahwa menentang Kyai, selain tidak sopan juga dilarang agama. Bahkan tidak memperoleh berkah karena durhaka kepada sang guru.

³¹ Sulton, M dan Khusnurridlo, *Manajemen Pesantren Dalam Perspektif Global*, (Yogyakarta: Laksbang Press, 2006), hal. 12.

- c. Hidup hemat dan sederhana benar-benar diwujudkan dalam lingkungan pesantren. Hidup mewah hampir tidak didapatkan disana.
- d. Kemandirian amat terasa di pesantren. Para santri mencuci pakaian sendiri, membersihkan kamar tidurnya, bahkan sampai memasak sendiri.
- e. Jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan (*Ukhuwwah Islamiyyah*) sangat mewarnai pergaulan di pesantren. Ini disebabkan selain kehidupan yang mereta dikalangan santri, juga karena mereka harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama, seperti shalat berjamaah, membersihkan masjid, dan belajar bersama.
- f. Disiplin sangat dianjurkan. Untuk menjaga kedisiplinan ini pesantren biasanya memberikan sanksi-sanksi edukatif.
- g. Keprihatinan untuk mencapai tujuan mulia. Hal ini sebaai akibat kebiasaan puasa sunnah, dzikir, dan i'tikaf, shalat tahajjud, dan bentuk-bentuk *riyadlah* kainnya atau menauladani Kyainya yang terbiasa dengan kehidupan *zuhud*.
- h. Pemberian ijazah. Yaitu pencantuman nama dalam satu daftar mata rantai pengalihan pengetahuan yang diberikan kepada santri-santri yang berprestasi. Hal ini menandakan adanya restu Kyai kepada santrinya untuk mengajarkan sebuah teks kitab yang dikuasai penuh.

6. Tradisi Salafisme Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki keunikan tersendiri ditengah hiruk-pikuk problematika pendidikan di tanah air, pesantren tetap *survive* dengan semangat tradisi yang mengagumkan. Di kalangan umat Islam tradisional pesantren masih dianggap sebagai model pendidikan yang menjanjikan bagi perwujudan masyarakat yang beradab. Karena eksistensi pesantren merupakan wadah bagi manifestasi tradisi agung (istilah Martin Van Bruinessen), yang dalam bahasa pesantren dikenal dengan *al-Akhlaq al-Karimah*.

Aplikasi dari nilai *al-Akhlaq al-Karimah* tercermin dari perilaku santri sehari-hari berupa sikap *tawadlu*, sederhana, yang disertai dengan prinsip hidup mandiri. Hal ini bisa dilihat dalam pola hidup santri sehari-hari, mereka hidup ditengah kumpulan santri-santri lain dengan fasilitas yang sangat sederhana, mulai dari alas tidur yang hanya berupa tikar (bahkan terkadang tidak memakai alas), menu makanan seadanya, dan mengerjakan semua kebutuhan sehari-hari (mencuci, memasak, dan membersihkan lingkungan pesantren) secara mandiri.

Keberadaan pesantren kontras berbeda dengan praktek pendidikan pada intitusi pendidikan lainnya, sehingga dinamika sekaligus problematika yang muncul kemudian, juga menampilkan watak yang khas dan eksotik. Di era globalisasi sekarang ini, Alfin Toffler membayangkan

akan terciptanya 'masyarakat informasi' (*the informational society*) yang sulit untuk dihindari oleh negara manapun di permukaan bumi ini, termasuk Indonesia. Sehingga, fenomena globalisasi yang begitu cepat mengalami akselerasi dalam pelbagai aspek, sebagai konsekuensi logis dari penerapan *high tech* (teknologi tinggi), menyebabkan bangsa Indonesia tergiring pada pola interaksi yang amat cepat dan massif dengan negara-negara lain di dunia. Dalam fase masyarakat informasi inilah, pesantren semakin menghadapi tantangan yang tidak ringan dan lebih kompleks ketimbang periode waktu sebelumnya.

Di tengah pergulatan masyarakat informasional, pesantren dipaksa memasuki ruang kontestasi dengan institusi pendidikan lainnya, terlebih dengan sangat maraknya pendidikan berlabel luar negeri yang menambah semakin ketatnya persaingan mutu out put pendidikan. Kompetisi yang kian ketat itu, memposisikan institusi pesantren untuk mempertaruhkan kualitas out-put pendidikannya agar tetap unggul dan menjadi pilihan masyarakat, terutama umat Islam. Ini mengindikasikan, bahwa pesantren perlu banyak melakukan pembenahan internal dan inovasi baru agar tetap mampu meningkatkan mutu pendidikannya.

Persoalan ini tentu saja berkorelasi positif dengan konteks pengajaran di pesantren. Di mana, secara tidak langsung mengharuskan adanya pembaharuan (modernisasi) kalau boleh dikatakan demikian dalam berbagai aspek pendidikan di dunia pesantren. Sebut saja misalnya

mengenai kurikulum, sarana-prasarana, tenaga kependidikan (pegawai administrasi), guru, manajemen (pengelolaan), sistem evaluasi dan aspek-aspek lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren.

Jika aspek-aspek pendidikan diatas tidak mendapatkan perhatian yang proporsional untuk segera dimodernisasi, atau minimalnya disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat (*social needs and demand*), tentu akan mengancam survival pesantren di masa depan. Masyarakat akan semakin tidak tertarik dan lambat laun akan meninggalkan pendidikan pesantren, kemudian lebih memilih institusi pendidikan yang lebih menjamin kualitas output-nya. Pada taraf ini, pesantren berhadap-hadapan dengan dilema antara tradisi dan modernitas.

Ketika pesantren tidak mau beranjak ke modernitas, dan hanya berkuat dan mempertahankan otentisitas tradisi pengajarannya yang khas tradisional, dengan pengajaran yang hanya bermuatan al-Qur'an dan al-Hadis serta kitab-kitab klasiknya tanpa adanya pembaharuan metodologis, maka selama itu pula pesantren harus siap ditinggalkan oleh masyarakat.

Pengajaran Islam tradisional dengan muatan-muatan yang telah disebutkan di atas, tentu saja harus lebih dikembangkan agar penguasaan materi keagamaan anak didik (baca: santri) bisa lebih maksimal, di samping juga perlu memasukkan materi-materi pengetahuan non-agama dalam proses pengajaran di pesantren.

Dengan begitu, pengembangan pesantren tidak saja dilakukan dengan cara memasukkan pengetahuan non-agama, melainkan agar lebih efektif dan signifikan.

Sebab, ketika didaktik-metodik yang diterapkan masih berkuat pada cara-cara lama yang ketinggalan zaman, maka selama itu pula pesantren sulit untuk berkompetisi dengan institusi pendidikan lainnya! Persoalannya, betulkah semua yang berwatak lama itu kurang baik

Terdapat beberapa kelemahan yang harus dibenahi dalam tradisi *salaf* antara lain³²

1. Kepemimpinan yang bersifat sentralistik dan hierarkis yang berpusat pada Kyai. Implikasi negatif yang akan muncul adalah ketika kepemimpinan pesantren mengedepankan otoritas sentral Kyai yang tidak lepas dari segala keterbatasan personal, diantaranya adalah ketidakmampuannya dalam merespon perkembangan masyarakat. Setidaknya, hal ini bisa dijelaskan ketika Kyai yang kebetulan tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti dan menguasai perkembangan mutakhir lebih cenderung untuk menolak mengubah pesantrennya mengikuti tuntutan zaman.
2. Apek metodologi pembelajaran yang lebih menekankan kepada transmisi keilmuan klasik. Hal ini hanya akan melahirkan penumpukan

³² Imam Tolkhah, dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan-Mengurai Akar Tradisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 83

keilmuan secara bulat dan tidak boleh dibantah, di mana santri menerima transmisi keilmuan klasik dari Kyai dalam bingkai *taken for granted*. Implikasi dari model pembelajaran demikian adalah *lesunya kreatifitas santri*, karena sistem demikian lebih tepatnya disebut *pengajian* daripada pendidikan.

3. Dis-Orientasi pesantren yang kehilangan kemampuan untuk mendefinisikan dan memposisikan dirinya di tengah perubahan realitas sosial yang cukup cepat. Pesantren yang mengidentifikasi dirinya sebagai pesantren *salaf* akan mengalami kondisi dilematis ketika dihadapkan dengan perubahan sosial.

Dis-Orientasi keilmuan yang dikemas dengan *salafiseme* pesantren, hanya akan menyebabkan mandulnya liberalisasi pendidikan Islam sebagaimana semangat spiritualitas wahyu. Sejatinya, sistem pendidikan pesantren adalah pendidikan yang membebaskan dan mempropagandakan kebebasan. Tidak ada sistem kependetaan dalam Islam, merupakan spiritualitas liberal dalam menafsirkan makna-makna yang ada dalam wahyu Islam.

Sistem pembelajaran kitab-kitab klasik yang hanya berorientasi kepada fiqh-sufistik dengan membatasi diri pada madzhab-madzhab tertentu kiranya perlu direvisi. Pengajaran teologi yang hanya mengadopsi pemikiran madzhab Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan kitab kajian yang tidak banyak memberikan gairah pemikiran perlu diperkaya dengan

diskursus teologi-teologi kontemporer yang lebih kontekstual dan mempunyai relevansi riil terhadap kehidupan manusia.

Kajian teologi ini juga perlu disertai dengan pembelajaran ilmu logika karena sifat dasar dari teologi sangat intelektualistik. Sebenarnya, di beberapa pesantren hal ini sudah diajarkan, tetapi sifatnya lebih mekanis daripada strategi mendorong berkembangnya pemikiran rasional, karena ilmu logika diletakkan sebagai dasar pembangunan pemikiran rasional yang meisahkan pemikiran-pemikiran yang cacat dari yang benar, dan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya pendahuluan itu disusun agar diperoleh hasil seperti yang diinginkan. Melalui ilmu logika, santri diharapkan mampu berfikir ilmiah dan rasional. Meskipun logika rasional dan ilmiah juga menyisakan banyak kekurangan dan berbagai keterbatasan yang selalu siap untuk direvisi sesuai perkembangan wawasan ilmu pengetahuan.

Dalam konteks fiqh, misalnya, pesantren *salaf* lebih menekankan kepada kitab-kitab karya ulama empat imam madzhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali) daripada kajian lintas madzhab dan aliran. *Fath al-Qorib*, *Fath al-Mu'in*, *Ia'annah at-Thalibin*, dan *Kifayat al-Ahyar* lebih akrab dipelajari santri daripada *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd, *Fiqh Ja'fari* karya Imam Ja'far, *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dan sebagainya.

Madzhab sunni merupakan madzhab satu-satunya yang harus dikaji, dan bahkan haram mempelajari fiqh Syi'ah. Sementara dalam bidang tasawuf, pemikiran al-Ghazali dan al-Junaid menjadi soko guru *tasawuf akhlaqi* yang mutlak untuk diteladani oleh para santri, dari pada Ibn Arabi, Ibn Sabâ€™in, Al-Hallaj, Al-Busthami, Al-Sarraj, dan sebagainya, yang cenderung menekankan *tasawuf falsafi*.³³

Dengan demikian, santri dibelenggu dengan figur Kyai sebagai soko guru keilmuan dan rasionalitas pemahaman yang mutlak diadopsi. Sehingga, santri menjadi manusia yang dikekang oleh berbagai tradisi yang kurang positif, seperti:

1. Santri berpandangan bahwa ilmu adalah hal yang sudah mapan dan hanya diperoleh melalui *barokah* Kyai.
2. Pandangan tidak kritis yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang diajarkan Kyai, Ustadz, dan kitab-kitab klasik adalah kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan apalagi dikritisi.
3. Metode pembelajaran dengan hafalan dan pemikiran tradisional yang diterapkan untuk semua Ilmu.
4. Pandangan hidup fatalistik yang menyerahkan kehidupan kepada keadaan dan perilaku sakral dalam menghadapi berbagai realitas duniawi.

³³ Imam Tolkhah, dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan-Mengurai Akar Tradisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 88.

Mansour Faqih menunjukkan bahwa pesantren dulu telah mengembangkan program kemasyarakatan. Pada masa dahulu kegiatan kemasyarakatan dari pesantren masih dilaksanakan secara tradisional. Pendekatan serta materi kegiatan kemasyarakatannya melalui bidang pengobatan dan penyembuhan tradisional. Selanjutnya kegiatan kemasyarakatannya semakin disesuaikan dengan perkembangan dan masalah masyarakat. Pesantren pabelan di Jawa Tengah, misalnya, memberikan beasiswa pada anak-anak miskin di sekitar pondok pesantren. Demikian halnya pesantren Gontor, Ponorogo Jawa Timur, melalui kemampuan mereka mengumpulkan zakat, kemudian menyalurkan kepada masyarakat miskin di desa sekitar mereka untuk meningkatkan perekonomian. Pendekatan yang dilakukan yakni dengan memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat yang membutuhkannya.³⁴

Pada tahun 1971, kerjasam LP3ES dan sejumlah pesantren dalam bidang pengembangan masyarakat sebagai gerakan sosial di pedesaan, memulai babak barunya sebagai lembaga pendidikan yang berperan ganda, yakni : pertama, sebagai pusat-pusat latihan pedesaan yang mampu mengembangkan pengetahuan dan logika berfikir, keterampilan serta pembinaan kepribadian pemuda. Kedua, sebagai lembaga sosial pedesaan yang dapat meningkatkan kemandirian dan swadaya kalangan masyarakat

³⁴ Mansour Faqih "Pengembangan Masyarakat di Pesantren: Hambatan dan Permasalahan" dalam Mnfred Oepen (Ed), *Dinamika Pesantren*..... hal. 150

desa untuk mengembangkan lingkungan secara rohaniyah, ekonomi dan fisik.³⁵

Pengalaman kerjasama pesantren dan LSM tersebut juga melahirkan tenaga-tenaga aktifis pengembangan masyarakat dari kalangan pesantren, mendirikan perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat (P3M).

Kegiatan pengembangan masyarakat (*Community Development*) pada dasarnya adalah upaya subyektif dan memihak kepada masyarakat tertindas (*dhu'afa*) dalam rangka memfasilitasi mereka dalam suatu proses penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya uapaya untuk pembebasan dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian secara partisipatif P3M berupaya untuk menempatkan masyarakat sebagai subyek keseluruhan upaya pengembangan masyarakat.

³⁵ Mansour Faqih “Pengembangan Masyarakat di Pesantren : Hambatan dan Permasalahan” hal. 151

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini, penelitian menggunakan pendekatan dan jenis penelitian studi kepustakaan, yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode penelitian dan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.³⁶ yang dalam hal ini memuat pemikiran Abdurrahman Wahid tentang masyarakat madani yang kemudian dihubungkan atau dilihat sebagai model dalam pemberdayaan Islam.

1. Obyek Penelitian

Dalam hal ini yang dijadikan obyek penelitian adalah pemikiran Abdurrahman wahid tentang modernisasi pesantren yang masuk dalam pengembangan masyarakat Islam.

a. Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat tekstual berupa konsep dan tulisan. Aspek-aspek yang akan diteliti adalah seputar apa dan bagaimana definisi, konsep, persepsi, pemikiran dan argumentasi yang terdapat di dalam literatur

³⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Orbor Indonesia, 2004), hal.3

yang relevan dengan pembahasan. Oleh karena itu, data yang akan diambil dan dikaji berasal dari data verbal yang abstrak kualitatif. Sedangkan data yang digunakan antara lain :

1) Data Primer

Sumber data primer, ialah sumber data yang diperoleh melalui pengamatan dan analisa terhadap literatur-literatur yang menjelaskan sejarah dan pemikiran Abdurrahman Wahid yang dipilih untuk dikaji kembali kesesuaiannya antara teks dengan realitas berdasarkan berbagai macam tinjauan ilmiah.

Adapun sumber data primer yang digunakan adalah:

- *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, karya Abdurrahman Wahid, Yogyakarta, Lkis, 2001.
- *Kyai Nyentrik Membela Pemerintah*, Karya Abdurrahman Wahid, Yogyakarta, Lkis 2000.
- *Islam, Anti-Kekerasan, dan Transformasi Nasional*, Abdurrahman Wahid, Yogyakarta, LkiS, 2000.
- *Mengurai Hubungan agama dan Negara*, karya Abdurrahman Wahid, Jakarta: Grasindo, 1999.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder, ialah sumber data yang di peroleh dari sumber-sumber bacaan yang mendukung sumber primer yang di anggap relevan, hal tersebut sebagai penyempurnaan bahan penelitian terhadap bahasan dan pemahaman peneliti.

Data Sekunder:

- *Gus Dur Siapa sih Sampeyan*, karya Al-Zhastraw, Jakarta: Erlangga, 1999.
- *Perubahan Pesantren*, karya Abd. A'la, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- *Tarekat, Pesantren dan Budaya Lokal*, M. Nadhim Zuhdi dkk (Ed), Surabaya: Sunan Ampel press Surabaya, 1999.
- *Biografi Gus Dur*, karya Greeg Barton, Yogyakarta, Lkis, 2006.

2. Analisis data; Analisis deskriptif, metode komparatif.

Data-data yang diperoleh diklasifikasikan kedalam data utama dan data penunjang. Setelah klasifikasi data, interpretasi, pengambilan substansi melalui analisis yang cermat, kemudian dilakukan komparasi dari berbagai pendapat. Komparasi dilakukan tidak saja terhadap pendapat yang sama, tetapi juga terhadap pendapat yang berbeda dalam suatu permasalahan yang sama, dengan kelebihan serta kekurangan masing-masing dari komparasi

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan terhadap pendapat yang dianggap mendekati kebenaran.

B. Unit Analisis

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain³⁷.

Pada dasarnya setiap orang yang berpikir, selalu berhadapan dengan kebutuhan dan atau keputusan untuk menyeleksi atau lebih tepat memilah-milahkan antara apa yang benar dan apa yang salah, apa yang mungkin dan yang tidak mungkin atau yang diragukan. Keputusan tentang ini melibatkan seleksi.

Dalam dunia penelitian, khususnya dalam studi kepustakaan, seleksi bergantung pada metode kritik teks. Metode kritik teks pada dasarnya mempertimbangkan tiga unsur sekaligus : teks, konteks dan wacana. *Teks* bukan hanya sekedar kata-kata yang tercetak atau tertulis pada lembaran kertas, tetapi semua jenis komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra dan sebagainya. *Konteks* ialah relasi antar teks yang memasukkan semua situasi yang terkait pula dengan hal-hal yang berada diluar teks, tetapi mempengaruhi pemakaian bahasa. Sedang yang dimaksud dengan *wacana*

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 248.

ialah upaya pengungkapan maksud-maksud atau pemahaman *teks* dan *konteks*, baik yang tersembunyi maupun yang gamblang atau blak-blakan³⁸.

Titik perhatian analisis wacana adalah menggambarkan *teks* dan *konteks* secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Jika komunikasi itu adalah antara teks dengan pembacanya maka yang diperlukan disini tidal lagi hanya proses kognitif dalam arti umum, tetapi mencakup semua proses analisis untuk mencapai tujuan penelitian.

C. Tahapan Penelitian

- a. Mencari sumber data, baik data primer maupun sekunder; yang pertama dilakukan adalah mencari sumber data sebanyak-banyaknya yang relevan dan sesuai dengan tema penelitian yang berupa buku atau artikel yang kemudihan dipilah-pilah menjadi data primer dan data sekunder. Hampir semua jenis bahan bacaan keputakaan (buku, artikel atau esai) dikelompokkan sebagai data sekunder atau sumber tangan kedua. Namun dari sudut diterbitkan atau ditlis oleh tangan pertama bisa dikategorikan kedalam sumber primer.
- b. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data
- c. Mencari ide umum tentang topik penelitian
- d. Mencari informasi pendukung; data primer dan data sekunder masih belum cukup untuk melengkapi seluruh data maka diperlukan jenis bahan

³⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 71

bacaan yang relevan dengan tema penelitian sebagai informasi pendukung data primer dan data sekunder.

- e. Mempertegas Fokus (perluas/persempit) dan mengorganisasikan bahan bacaan
- f. Reorganisasi bahan dan membuat catatan penelitian
- g. Review dan periksa lagi bahan bacaan
- h. Reorganisasikan lagi bahan/catatan dan mulai menulis.

BAB IV

BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID

A. Biografi Abdurrahman Wahid

Sosok kontroversi nan ulet dalam membangun budaya demokrasi, kutipan tersebut setidaknya bisa menjadi pijakan untuk menggambarkan figure Abdurrahman Wahid yang nyleneh, vokal dan kontroversi.

Nama lengkap Abdurrahman Wahid sebenarnya adalah Abdurrahman ad-Dakhil. Namun kemudian populer dengan nama Abdurrahman Wahid. Kata yang terakhir diambil dari nama ayahnya, K.H. Wahid Hasyim Putra KH. Hasyim Asy'ari. Ad-Dakhil sendiri mengandung pengertian *sang penakluk*. Sebuah nama yang diambil dari seorang perintis dinasti Bani Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol.

Abdurrahman Wahid memulai pendidikannya di SR, Jakarta. Selanjutnya melanjutkan ke SME Yogyakarta, bersamaan dengan itu, Abdurrahman Wahid belajar bahasa Arab di pesantren Al- Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, dibawah bimbingan K.H. Ali Maksum, mantan Rais A'am PB NU. Meski begitu Abdurrahman Wahid memilih tidak tinggal di pesantren, tetapi justru tinggal di rumah seorang Ketua Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta. Ketika menempuh SMEP inilah, Abdurrahman Wahid mulai berpikir kritis. Ini misalnya dapat dilihat dari buku yang dibacanya. Di usianya yang relatif hijau, Abdurrahman Wahid dengan didukung kemahirannya berbahasa Inggris (selain menguasai bahasa Inggris ia juga menguasai bahasa Belanda, Jerman,

Perancis dan Arab dengan segala dialektikanya), sudah membaca buku sekelas *Das Capital* yang ditulis bapak sosialis, Karl Max, *What is to be Done* karya Vladimir Ilyich Lenin, dan *Captain's Daughter* karya Turgenev. Lewat buku-buku inilah tampaknya yang telah mengantarkan Abdurrahman Wahid untuk berpikir liberal dan terkadang terlalu melangit.³⁹

Sebagaimana layaknya anak seorang Kyai, selepas SMEP, Abdurrahman Wahid pun melewati masa-masa pendidikannya dipesantren. Dia nataranya pernah menjadi santri pesantren Tegalrejo selama dua tahun, di bawah asuhan KH. Khudhori. Kemudian melanjutkan ke pesantren Tambak Beras selama empat tahun, dibawah bimbingan KH. Wahab Chasbullah.

Selepas dari pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, atas biaya dari Departemen Agama, yang kala itu dipegang oleh KH. Syaifudin Zuhri, 1964-1966, Abdurrahman Wahid melanjutkan studinya di Al-Azhar University, Cairo, Mesir, dengan mengambil Departemen of Higher Islamic and Arabic Studies. Ketika Al-Azhar University dipandang tidak lagi kondusif, Abdurrahman Wahid pun memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Selama tiga tahun di Mesir inilah, Abdurrahman Wahid lebih banyak meluangkan waktunya untuk mengunjungi berbagai perpustakaan di Mesir, di antaranya adalah perpustakaan Kairo, Perpustakaan Amerika Serikat, dan Perpustakaan Perancis.

Dari Mesir, Abdurrahman Wahid kemudian melanjutkan petualangan ke Negara Saddam Khusain, Irak tepatnya di Baghdad University. Berbeda dengan

³⁹ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Kacung Marijan (Ed), (Jakarta :PT Grasindo,2001) hal.30

Al-Azhar di Universitas barunya ini Abdurrahman Wahid mengambil fakultas sastra. Disini Abdurrahman Wahid tampak mempunyai minat akan kajian Islam Indonesia. Atas minatnya ini Abdurrahman Wahid di percaya meneliti asal usul historis Islam Indonesia. Dan mungkin juga karena kemampuan dan figurnya yang mendunia sampai sekarang Abdurrahman Wahid dipercaya sebagai *dewan Kurator* pada Saddam Husain University.

Merasa kurang puas dengan apa yang didapatkan dari Baghdad, Abdurrahman Wahid melanjutkan petualangan ke Eropa Barat kurang lebih selama satu tahun, yaitu setengah tahun di Belanda dan dua bulan di Prancis. Ketika di Belanda ini Abdurrahman Wahid sempat menjadi kandidat Master (S2) di Sorbonne University, Prancis. Akan tetapi setelah dipikir-pikir waktunya dianggap terlalu lama, Abdurrahman Wahid mangkir dan pulang ke tanah air.

Sekembalinya di tanah air Abdurrahman Wahid meniti kariernya sebagai ustad di pesantren Tebuireng. Selain itu, 1972-1974, menjadi dekan fakultas perbandingan Agama, Ushuluddin University Hasyim Asy'ari, UNHASY, (sekarang Institut Keislaman Hasyim Asy'ari, IKAHA), dan menjadi sekretaris pesantren Tebuireng, 1975-1979, sampai akhirnya hijrah ke Jakarta, 1979. di Jakarta Abdurrahman Wahid mengawali kariernya di PB Nu, dan mengajar IAIN Syarif Hidayatullah, sebelum akhirnya mendirikan pesantren Ciganjur, di Jakarta Selatan.

B. Kegiatan dan Karier Abdurrahman Wahid

Sepulang dari pengembaraannya mencari ilmu, Gus Dur kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru. Pada tahun 1971, tokoh muda ini bergabung di Fakultas Ushuludin Universitas Tebu Ireng Jombang. Tiga tahun kemudian ia menjadi sekretaris Pesantren Tebu Ireng, dan pada tahun yang sama Gus Dur mulai menjadi penulis. Ia kembali menekuni bakatnya sebagai penulis dan kolumnis. Lewat tulisan-tulisan tersebut gagasan pemikiran Gus Dur mulai mendapat perhatian banyak. Djohan Efendi, seorang intelektual terkemuka pada masanya, menilai bahwa Gus Dur adalah seorang pencerna, mencerna semua pemikiran yang dibacanya, kemudian diserap menjadi pemikirannya tersendiri. Sehingga tidak heran jika tulisan-tulisannya jarang menggunakan foot note.

Pada tahun 1974 Gus Dur diminta pamannya, K.H. Yusuf Hasyim untuk membantu di Pesantren Tebu Ireng Jombang dengan menjadi sekretaris. Dari sini Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi nara sumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM. Pertama di LP3ES bersama Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin dan Adi Sasono dalam proyek pengembangan pesantren, kemudian Gus Dur mendirikan P3M yang dimotori oleh LP3ES.

Pada tahun 1979 Gus Dur pindah ke Jakarta. Mula-mula ia merintis Pesantren Ciganjur. Sementara pada awal tahun 1980 Gus Dur dipercaya sebagai wakil katib syuriah PBNU. Di sini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan

perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku dan disiplin. Gus Dur semakin serius menulis dan bergelut dengan dunianya, baik di lapangan kebudayaan, politik, maupun pemikiran ke-Islaman. Karier yang dianggap 'menyimpang'-dalam kapasitasnya sebagai seorang tokoh agama sekaligus pengurus PBNU-dan mengundang cibiran adalah ketika menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada tahun 1983. Ia juga menjadi ketua juri dalam Festival Film Indonesia (FFI) tahun 1986, 1987.

Pada tahun 1984 Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim ahl hall wa al-'aqdi yang diketuai K.H. As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada muktamar ke-28 di pesantren Krapyak Yogyakarta (1989), dan muktamar di Cipasung Jawa Barat (1994). Jabatan ketua umum PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat presiden RI ke-4. Meskipun sudah menjadi presiden, ke-nyleneh-an Gus Dur tidak hilang, bahkan semakin diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Dahulu, mungkin hanya masyarakat tertentu, khususnya kalangan nahdliyin yang merasakan kontroversi gagasannya. Sekarang seluruh bangsa Indonesia ikut memikirkan kontroversi gagasan yang dilontarkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid.

Catatan perjalanan karier Gus Dur yang patut dituangkan dalam pembahasan ini adalah menjadi ketua Forum Demokrasi untuk masa bakti 1991-1999, dengan sejumlah anggota yang terdiri dari berbagai kalangan, khususnya kalangan nasionalis dan non muslim. Anehnya lagi, Gus Dur

menolak masuk dalam organisasi ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Tidak hanya menolak bahkan menuduh organisasi kaum 'elit Islam' tersebut dengan organisasi sektarian.

Dari paparan tersebut di atas memberikan gambaran betapa kompleks dan rumitnya perjalanan Gus Dur dalam meniti kehidupannya, bertemu dengan berbagai macam orang yang hidup dengan latar belakang ideologi, budaya, kepentingan, strata sosial dan pemikiran yang berbeda. Dari segi pemahaman keagamaan dan ideologi, Gus Dur melintasi jalan hidup yang lebih kompleks, mulai dari yang tradisional, ideologis, fundamentalis, sampai modernis dan sekuler. Dari segi kultural, Gus Dur mengalami hidup di tengah budaya Timur yang santun, tertutup, penuh basa-basi, sampai dengan budaya Barat yang terbuka, modern dan liberal. Demikian juga persentuhannya dengan para pemikir, mulai dari yang konservatif, ortodoks sampai yang liberal dan radikal semua dialami.

Pemikiran Gus Dur mengenai agama diperoleh dari dunia pesantren. Lembaga inilah yang membentuk karakter keagamaan yang penuh etik, formal, dan struktural. Sementara pengembaraannya ke Timur Tengah telah mempertemukan Gus Dur dengan berbagai corak pemikirann Agama, dari yang konservatif, simbolik-fundamentalis sampai yang liberal-radikal. Dalam bidang kemanusiaan, pikiran-pikiran Gus Dur banyak dipengaruhi oleh para pemikir Barat dengan filsafat humanismenya. Secara rasa maupun praktek prilaku yang humanis, pengaruh para kyai yang mendidik dan membimbingnya mempunyai andil besar dalam membentuk pemikiran Gus

Dur. Kisah tentang Kyai Fatah dari Tambak Beras, KH. Ali Ma'shum dari Krpyak dan Kyai Chudhori dari Tegalrejo telah membuat pribadi Gus Dur menjadi orang yang sangat peka pada sentuhan-sentuhan kemanusiaan.

Dari segi kultural, Gus Dur melintasi tiga model lapisan budaya. Pertama, Gus Dur bersentuhan dengan kultur dunia pesantren yang sangat hierarkis, tertutup, dan penuh dengan etika yang serba formal; kedua, dunia Timur yang terbuka dan keras; dan ketiga, budaya Barat yang liberal, rasional dan sekuler. Kesemuanya tampak masuk dalam pribadi dan membentuk sinergi. Hampir tidak ada yang secara dominan berpengaruh membentuk pribadi Gus Dur. Sampai sekarang masing-masing melakukan dialog dalam diri Gus Dur. Inilah sebabnya mengapa Gus Dur selalu kelihatan dinamis dan sulit dipahami. Kebebasannya dalam berpikir dan luasnya cakrawala pemikiran yang dimilikinya melampaui batas-batas tradisionalisme yang dipegangi komunitasnya sendiri.⁴⁰

C. Penghargaan yang diperoleh Abdurrahman Wahid

- Tokoh 1990, Majalah Editor, tahun 1990
- Ramon Magsaysay Award for Community Leadership, Ramon Magsaysay Award Foundation, Philipina, tahun 1991
- Islamic Missionary Award from the Government of Egypt, tahun 1991
- Penghargaan Bina Ekatama, PKBI, tahun 1994

⁴⁰ <http://BeYourSelf.co.id.html>, diakses 1 Oktober 2007

- Man Of The Year 1998, Majalah berita independent (REM), tahun 1998
- Honorary Degree in Public Administration and Policy Issues from the University of Twente, tahun 2000
- Gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Jawaharlal Nehru, tahun 2000
- Doctor Honoris Causa dalam bidang Philosophy In Law dari Universitas Thammasat Thaprachan Bangkok, Thailand, Mei 2000
- Doctor Honoris Causa dari Universitas Paris I (Panthéon-Sorbonne) pada bidang ilmu hukum dan politik, ilmu ekonomi dan manajemen, dan ilmu humaniora, tahun 2000
- Penghargaan Kepemimpinan Global (The Global Leadership Award) dari Columbia University, September 2000
- Doctor Honoris Causa dari Asian Institute of Technology, Thailand, tahun 2000
- Ambassador for Peace, salah satu badan PBB, tahun 2001
- Doctor Honoris Causa dari Universitas Sokka, Jepang, tahun 2002
- Doctor Honoris Causa bidang hukum dari Konkuk University, Seoul Korea Selatan, 21 Maret 2003

BAB V

PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG MODERNISASI

PESANTREN

A. Dinamisai dan Modernisasi pesantren

Proses dinamisasi suatu lembaga kemasyarakatan, lebih-lebih yang seperti pesantren, adalah suatu usaha yang rumit dan memakan waktu lama. Tidak ada satu konsep pun yang disusun tanpa mengalami perubahan-perubahan dalam pelaksanaannya kemudian. Yang dimaksud dengan penggunaan kata dinamisasi dan modernisasi. Dinamisasi, pada dasarnya mencakup dua buah proses, yaitu penggalakan kembali nilai-nilai hidup positif yang telah ada, selain mencakup pula pergantian nilai-nilai lama itu dengan nilai-nilai baru yang dianggap lebih sempurna. Proses pergantian nilai itu dinamai modernisasi. Jelaslah dari keterangan ini bahwa pengertian modernisasi sebenarnya telah terkandung dalam kata dinamisasi.

Sedangkan kata dinamisasi itu sendiri, dalam penggunaannya disini akan memiliki konotasi “perubahan ke arah Penyempurnaan keadaan“, dengan menggunakan sikap hidup dan peralatan yang telah ada sebagai dasar⁴¹.

Kesadaran yang mulai tumbuh mengenai pesantren itu sering disertai dengan sikap apresiatif secukupnya. Misalnya dengan memberi penilaian bahwa sistem pesantren adalah merupakan suatu yang bersifat asli atau indegenus Indonesia, sehingga dengan sendirinya bernilai positif dan harus

⁴¹ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, (LkiS, Yogyakarta, 2001) hal. 53

dikembangkan. Penilaian itu menempatkan dunia pesantren pada deretan daftar perbendaharaan nasional, dan menumbuhkan pengakuan akan peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan nasional.⁴²

B. Pola Modernisasi Pesantren

Modernisasi pesantren di Indonesia dalam rangka peningkatan aktualisasi pengabdianya di tengah masyarakat dewasa ini, barangkali merupakan tema pemikiran yang dapat melahirkan berbagai pendapat, tergantung dari sudut pandang mana persoalan tersebut dilihat dan faktor-faktor apa yang dianggap mempengaruhi analisisnya. Dengan sekedar mengedepankan garis besarnya saja, maka pola modernisasi pesantren di Indonesia adlah sebagai berikut:

Pertama, modernisasi pesantren harus tetap tertumpu pada asas keIslaman, dan dalam batas tertentu juga mempertahankan ciri khas tradisionalitasnya yang antara lain memuat nilai-nilai keihlasan, kesederhanaan dan kemandirian. Tidak ada masalah jika pesantren tertentu diperbaharui, misalnya dengan mendirikan sekolah umum dan atau balai latihan kerja sebagai jawaban atas kebutuhan zaman. Akan tetapi nafas keberagaman di kalangan para santri jangan sampai mengalami penurunan. Tradisi pesantren dalam bingkai keIslamannya yang kokoh tidaklah mungkin dikorbankan atas nama modernisasi; karna boleh jadi setelah roda modernisasi bergerak sedemikian kencangnya, justru kelak diperlukan rem pengarah yang

⁴² Nur Kholis Madjid, "*permasalahan umum yang dihadapi pesantren*" Bina Pesantren, (Oktober, 2000), hal. 9.

menyejukan, yaitu agama dengan perekat moral spiritualitasnya yang selama ini menjadi fokus perhatian dunia pesantren.

Kedua, modernisasi pesantren harus berorientasi pada keseimbangan antara imtek dengan imtaq dalam arti yang seluas-luasnya. Peranan imtek tidak bisa diabaikan, oleh karena itulah senjata kehidupan yang mutlak untuk dikuasai pada zaman modern yang sarat dengan persaingan. Zaman modern memang dilahirkan oleh berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga tanpa penguasaan terhadapnya siapa pun tidak mungkin mampu melaksanakan peran maksimal dalam percaturan hidup di masyarakat. Sekali lagi, pengembangan iptek di pesantren harus tetap dalam persandingannya yang berimbang dengan pengokohan imtaq. Gejala positif yang muncul belakangan ini tampaknya sudah mengarah kesana, ditandai antara lain dengan ketebukaan konstruktif sementara pesantren terhadap modernisasi, disamping kesediaan institusi pengembangan iptek tertentu untuk memberikan bantuan pengembangan bidang tersebut kepada pesantren.

Ketiga, modernisasi pesantren seyogyanya tetap memberikan peluang terjadinya keberagaman masing-masing untuk mempertahankan ciri khas dan program pendidikannya, dalam arti tidak cenderung menggiring ke arah pola yang seragam, dan katakanlah secara masal dijadikan bagian integral dari sistem pendidikan formal baik dalam wujud madrasah atau sekolah umum. Alasannya, karena masyarakat muslimin di Indonesia demikian luas dan beragam yang boleh jadi minat dan kebutuhannya terhadap jenis layanan pendidikannya juga berbeda-beda., sementara arah perkembangan zaman ke

depan cenderung menolak keseragaman, rutinitas dan sesuatu yang menjenuhkan. Disparitas pesantren yang menyediakan pilihan sedemikian rupa kepada para santri dalam mengikuti program studi barangkali kelak akan mampu menciptakan iklim kependidikan yang segar, sehingga mendukung keberhasilan program modernisasi pesantren itu sendiri.

Keempat, modernisasi pesantren seyogyanya dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin corak aslinya sebagai pendidikan mandiri, dalam arti tidak tidak mengandalkan santrinya kelak menjadi pegawai pemerintah semata. Di masa lalu kecenderungan semacam ini pernah dipandang sebagai kurang tanggap pada dalam memburu kesempatan. Tetapi kini semakin jelas bahwa disamping formasi lapangan kerja sebagai pegawai negeri sangat terbatas, ada kecenderungan lain bahwa modernisasi justru sejalan dengan swastanisasi, dalam arti secara kuantitatif peluang kerja lebih banyak tumbuh dan tersedia pada sektor swasta, dan secara kualitatif rata-rata tingkat kesejahteraan hidup yang dicapai seseorang di sana juga cenderung lebih baik. Karenanya, ini adalah momentum bagi dunia pesantren yang sejak awal memiliki dasar mentalitas wira usaha, sehingga sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan dengan baik pada saat-saat yang justru dikatakan tepat.

Kelima, modernisasi pesantren perlu dilakukan dalam keterkaitan eratnya dengan realitas dan kebutuhan lingkungan. Pesantren yang lokasinya di pedesaan, silahkan membuka program pendidikan, misalnya yang melahirkan santri terampil dalam bidang agro industri. Mungkin juga diperlukan pesantren yang menekuni bagaimana caranya mendidik santri

yang memiliki kemampuan berdagang mulai dari kecil-kecilan, untuk mengantisipasi tamatan SLTA dengan biaya yang dikeluarkan sekian juga dan akhirnya menjadi tenaga kasar di pabrik-pabrik. Khusus di perkotaan, tampaknya perlu dipikirkan kemungkinan pengembangan model pesantren industri. Perwujudannya, katakanlah membangun sebuah kompleks asrama untuk pekerja industri, yang dilengkapi dengan prasarana ibadah dan pendidikan agama serta pelatihan keterampilan. Santri pada pesantren dimaksud memang bekerja industri, dan karenanya harus membayar seperti layaknya menyewa tempat kost. Yang jelas sasarannya adalah bagaimana mencari solusi atas problem kehidupan muda-mudi kost di kawasan industri di satu pihak, dan upaya pembinaan pemahaman, pengalaman dan moralitas keagamaan, serta bimbingan keterampilan dalam rangka peningkatan karir kerja mereka, yang kesemuanya itu dalam kerangka realisasi konsep pendidikan sepanjang hayat dalam Islam.

C. Dinamisasi dan Modernisasi Pesantren Menurut Abdurrahman Wahid

Proses dinamisasi suatu lembaga kemasyarakatan, lebih-lebih yang seperti pesantren, adalah suatu usaha yang rumit dan memakan waktu lama. Tidak ada satu konsep pun yang disusun tanpa mengalami perubahan-perubahan dalam pelaksanaannya kemudian. Yang dimaksud dengan penggunaan kata dinamisasi dan modernisasi. Dinamisasi, pada asanya mencakup dua buah proses, yaitu penggalakan kembali nilai-nilai hidup positif yang telah ada, selain mencakup pula pergantian nilai-nilai lama itu

dengan nilai-nilai baru yang dianggap lebih sempurna. Proses pergantian nilai itu dinamai modernisasi. Jelaslah dari keterangan ini bahwa pengertian modernisasi sebenarnya telah terkandung dalam kata dinamisasi.

Sedangkan kata dinamisasi itu sendiri, dalam penggunaannya disini akan memiliki konotasi “perubahan ke arah Penyempurnaan keadaan“ dengan menggunakan sikap hidup dan peralatan yang telah ada sebagai dasar.

Untuk dapat mengemukakan suatu konsep yang relevan bagi kebutuhan pesantren, kita harus mengetahui terlebih dahulu garis besar situasi yang dihadapi oleh pesantren dewasa ini.

Situasi kejiwaan yang secara faktual dirasakan oleh pesantren dewasa ini adalah meluasnya rasa tak menentu, yang biasanya disebut keadaan rawan.manifestasi umu dari keadaan rawan di pesantren tampak pada dua reaksi terhadap nilai-nilai kehidupan yang berada pada masa transisi dewasa ini. Reaksi pertama berbentuk menutup diri dari perkembangan umum masyarakat luar, terutama dari kegiatan yang mengancam kemurnian kehidupan beragama. Isolasi ini dilakukan begitu rupa sehingga pertukaran pikiran yang berarti dengan dunia luar praktis terhenti sama sekali. Dan reaksi yang kedua justru mempergiat proses penciptaan solidaritas yang kuat antara pesantren dan masyarakat dengan cara melaksanakan acara besar-besaran yang ternyata membutuhkan biaya biaya besar padahal dana yang ada sangat terbatas.

Kedua reaksi diatas menunjukkan dengan nyata bahwa pesantren tidak memiliki pimpinan yang efektif. Dengan menyadari kondisi ini, maka

dibutuhkan konsep perbaikan yang relevan bagi kebutuhan pesantren, melalui strategi dasar yaitu meyakinkan pesantren keadaan rawan ini dapat mereka atasi dengan melaksanakan proyek-proyek perbaikan yang bersifat selektif dan bertahap. Dengan demikian kemampuan yang betapa terbatasnya sekalipun akan dapat dipusatkan dengan penggarapan sebuah proyek saja pada suatu waktu atau tahap.⁴³

Yang dimaksud dengan selektif adalah proyek yang seba terbatas ruang lingkupnya , begitu juga besar pembiayaan yang diperlukan serta sasaran yang hendak dicapainya juga tidak luas.

Didalam penggarapan proyek-proyek yang bersifat selektif, dibuat penggolongan menurut kelompok masing-masing. Secara umum penggolongannya adalah:

1. kelompok pembinaan pimpinan pesantren yang dititik beratkan kepada pengembangan pola-pola kepemimpinan pesantren yang lebih sesuai dengan kepentingan pesantren dimasa depan. Progam latihan kepemimpinan dan juga penyusunan pola-pola peremajaan pimpinan bagi pesantren adalahbeberapa diantara proyek-proyek yang dapat digolongkan kedalam kelompok ini.
2. kelompok pembinaan mutu pengajara dipesantren, yang meliputi proyek-proyek berikut penyusunan kurikulum yang lebih relevan bagi kebutuhan masyarakat, penyusunan shilabus, penataran bagi tenaga

⁴³ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, (Yogyakarta : LkiS, 2007) hal. 57

pengajar, penyediaan alat-alat pengajaran yang lebih memadai bagi kebutuhan.

Sebagai lembaga pendidikan pesantren ikut bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan bangsa secara keseluruhan. Sedangkan secara khusus pesantren bertanggung jawab atas kelangsungan tradisi keagamaan (Islam) yang secara penuh tujuan pendidikan pesantren adalah membentuk manusia mukmin yang sejati punya kualitas moral dan intelektual.

Selama ini memang banyak dijumpai pesantren-pesantren yang kuat mempertahankan model tradisi pendidikan klasik, yang menanamkan dirinya sebagai pesantren *salaf* karena acuan keilmuan secara refensial bertumpu pada kitab-kitab karangan ulama-ulama salafy. Namun sekarang lambat laun berkembang dan sedikit banyak mulai membuka diri pada dunia luar, tentunya dengan penyaringan yang cukup ketat. Materi pendidikan di madrasah pesantren yang biasanya menggunakan buku-buku klasik tulisan ulama salaf, yang di Indonesia populer dengan nama *kitab kuning*. Sekarang mulai ditambah materi umum dan penguasaan ilmu-ilmu teknologi informasi dan komunikasi.

Pesantren yang sebenarnya sangat berpotensi sebagai lembaga pendidikan yang punya khazanah intelektualisme yang tinggi karena model-model pendidikan nya tidak terikat oleh waktu sehingga santri bebas belajar menurut fak dan materi yang disukai. bahkan kitab-kitab yang dipakai tidak kalah bahkan lebih dibanding perguruan tinggi agama .

Pesantren tetap mempertahankan pendidikan Islam klasik, termasuk sufisme, namun disisi lain juga memperkenalkan para siswa dan mahasiswa yang telah melek secara teologi pada pemikiran kritis Barat dengan cara yang bisa mendorong terjadinya sintesis antara dua tradisi keilmuan Barat.⁴⁴

3. Kelompok pembinaan pola-pola hubungan pesantren dengan lembaga kemasyarakatan yang lainnya, meliputi pola-pola hubungan dengan lembaga keagamaan diluar Islam, lembaga-lembaga pengembangan dan penelitian di berbagai lapangan serta lembaga pemerintah.

Gus Dur sebagai guru bangsa sangat teguh membela kebebasan beragama dan anti-kekerasan. Abdurrahman Wahid sangat menghormati perbedaan pendapat, aliran, agama, kepercayaan, suku, warna kulit dan jenis kelamin. Sebagai orang pesantren dan berkiprah didunia pesantren, ia juga menjalin hubungan dengan lembaga keagamaan di luar Islam. Bahkan abdurrahman Wahid telah mengukuhkan keputusan Muktamar Nasional NU pada Tahun 1993 yang memutuskan menerima pancasila berdasarkan pertimbangan keagamaan.⁴⁵ Yang bermaksud melindungi segenap warga Indonesia yang berbeda agama suku, ras dan golongan. Selain itu ia juga berhubungan baik dengan pemeluk agama lain, hal itu terbukti pada tahun 1974, di Bali Gus Dur bertemu dengan ibu Gedong Bagoes Oka (pemuka agama Hindu) dan Romo Y.B Mangunwijaya (tokoh agama Katolik. Mereka

⁴⁴ Greeg Barton, Biography Gus Dur, hal. 67

⁴⁵ Einar M. Sitompul, NU asas Tunggal Pancasila dan Komitmen Kebangsaan, dalam Ellyasa KH. Darwin (Ed), *Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta :LkiS, 1994), hal.88

berdiskusi mencari titik temu agama-agama. Selain itu ia juga pernah bertemu dengan Swami Prakash (pemuka agama Hindu dari India)) yang sangat dihormati . disamping itu Gus Dur juga aktif di organisasi-organisasi perjuangan.

Hal ini penting untuk menumbuhkan moralitas muslim inklusiv terbuka dengan perubahan tetapi tetap memegang prinsip keagamaan.

4. kelompok pembinaan keterampilan bagi para santri, baik meliputi pendidikan kejuruan tehnik mapun pendidikan karakter yang mampu menyangandang bebanpenyebaran ide keterampilan itu sendiri dengan baik.

Pola pengembangan melalui pendidikan keterampilan dipesantren , mulai di cetuskan oleh mantan menteri agama H. A. Mukti Ali. Dalam waktu hanya 6 tahun pola ini mengalami beberapa perubahan dalam dirinya. Semula, pendidikan keterampilan hanya dimaksudkan sebagai progam pelengkap untuk memperkenalkan mengembangkan penghargaan pada nilai penting pada kerja tangan sebagai pengganti intelektualisme keagamaan yang bersifat verbalistis yang telah berabad-abad melatar belakangi sikap hidup keluarga pesantren. Akan tetapi pola pendidikan keterampilan ini kemudian berkembang menjadi progam yang dimaksudkan kedalam kurikulum sekolah-sekolah agama di pesantren sebagai bagian inti yang tidak kalah dari pelajaran agama. Pendidikan keterampilan itu sendiri telah dipecah-pecah menjadi komponen-komponen berbeda , seperti pendidikan kepramukaan, pendidikan kesehatan, dan pendidikan kejuruan yang meliputi pertanian dan elektronika.

Bagaimanapun juga jelas pendidikan keterampilan telah turut mengubah arah kehidupan pesantren. Lebih-lebih karena ia ditopang oleh dukungan departemen agama secara moril dan materiil.

Pesantren memiliki dua potensi besar yaitu potensi pendidikan dan pengembangan masyarakat. Menurut KH. Sahal Mahfudz mengemukakan kalau pesantren ingin berhasil sumber daya manusia yang salah satu dimensinya adalah pengembangan semua sumber daya, maka pesantren harus melengkapi dirinya dengan tenaga yang terampil mengelola sumber daya yang ada dari lingkungan, disamping syarat lain yang diperlukan untuk berhasilnya sumber daya manusia, sudah barang tentu pesantren harus tetap menjaga potensinya sebagai lembaga pendidikan⁴⁶.

Masih banyak pesantren yang menjalankan sistem pendidikan salafi/tradisional dan konvensional dengan membatasi diri pada pengajaran kitab-kitab klasik dan pembinaan moral keagamaan semata, mereka memang unggul dalam melahirkan santri yang memiliki keshalihan, kemandirian (tidak terlalu tergantung pada peluang kerja pemerintah) serta kecakapan dalam penguasaan ilmu keIslaman, tetapi dalam persaingan di era modern ini, tuntutan kehidupan global menghendaki kualitas sumber daya manusia terdidik di bidangnya. Realitas output pesantren yang memiliki sumber daya manusia kurang kompetitif inilah yang kerap menjadikannya termarginalisasi

⁴⁶ Sahal Mahfudz "Pengembangan Masyarakat Pesantren : Antara Fungsi dan Tantangan" dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher (Ed), diterj. Shonhadji, *Dinamika Pesantren : Dampak Pesantren dalam pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, (Surabaya: Hikmah, 1995), hal.101.

dan kalah bersaing dengan output pendidikan formal baik agama maupun umum.

Pernyataan di atas sesuai dengan pemikiran pengembangan masyarakat menurut Abdurrahman Wahid bahwa untuk mencapai pengembangan masyarakat secara umum harus dimulai dari pengembangan individu dengan cara mengembangkan sumber daya manusia. Dan disinilah peran pesantren sangat dibutuhkan, dimana pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai legitimasi tradisional, yang menjadikannya sebagai simbol budaya dan sarana yang efektif untuk menggerakkan perubahan. Jadi sebagai penggerak perubahan maka lebih dulu pesantren harus melakukan perubahan dalam diri lembaganya.

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang tumbuh secara murni dari kalangan muslim di Indonesia, pesantren memiliki kemungkinan sangat besar untuk terlibat dalam proses perubahan dari waktu ke waktu, termasuk kaitannya dengan gerak modernisasi dewasa ini. Setidaknya demikianlah menurut kemungkinan teoritisnya, mengingat dalam kemandirian penuhnya ditengah berbagai jenis lembaga pendidikan yang lain pesantren tidak terikat dengan tata aturan yang ketat dalam orbit birokrasi pemerintahan, sehingga untuk mengubah dan memperbarui segala hal yang dipandang penting dalam rangka menyahuti kebutuhan riil masyarakat dan kemajuan zaman, pada hakikatnya tidaklah mengalami kesulitan.

D. Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Agama

Penulis mencoba untuk mengeksplorasi beberapa pokok pikiran Gus Dur tentang Islam dan masalah-masalah keummatan. Dalam pembahasan ini, tidak semua pokok pikiran Gus Dur dapat dieksplorasi oleh penulis karena segala keterbatasan. Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis mengangkat beberapa permasalahan keummatan dalam konteks kekinian. Pokok pemikiran Gus Dur tentang Islam dan Permasalahan keumatan yang dimaksud penulis disini adalah masalah Islam dan kepemimpinan bangsa, kajian sosial budaya, dan masalah keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

1. Islam dan Kepemimpinan Bangsa

Abdurrahman Wahid mencoba untuk menyodorkan keIslaman yang menunjukkan universalisme Islam. Menurut beliau, ada lima jaminan dasar untuk menampilkan universalisme Islam baik kepada perorangan maupun kelompok. Kelima nya yaitu; keselamatan fisik masyarakat dari tindakan badani diluar ketentuan hukum, keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk berpindah agama, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda dan milik pribadi diluar prosedur hukum, dan keselamatan profesi.

Dalam pandangan kelima dasar tersebut tidak menjadi jaminan untuk keselamatan umat manusia tanpa adanya kosmopolitanisme peradaban Islam. Dalam kosmopolitanisme peradaban Islam, harus menghilangkan batasan etnis, pluralisme budaya, dan heterogenitas

politik. Hal ini akan tercapai apabila terjadi keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum Muslimin dan kebebasan berfikir semua masyarakat termasuk yang non muslim (Moeslim Abdurrahman, 1995). Karena Islam merupakan *rahmatan lil alamin* yang harus dibuktikan dengan dalam wujud kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Disamping itu juga kosmopolitanisme Islam yang mengacu pada modernisasi religiusitas berarti harus berlandaskan keagamaan dan pembebasan bagi masyarakat untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, yang berarti konsistensi terhadap demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) mutlak di perlukan.

Beliau menyatakan bahwa ada beberapa hal dalam universalisme ajaran Islam, yaitu; toleransi, keterbukaan sikap, kepedulian terhadap unsur-unsur utama kemanusiaan, dan keperihatinan dengan kearifan akan keterbelakangan yang dialami kaum muslimin agar terbebas dari belenggu kebodohan dan kemiskinan yang mendera mayoritas kaum muslimin sekarang ini . Universalisme Islam juga berimplikasi pada kesalehan social.

Gus Dur melakukan penolakan terhadap formalisasi, ideologisasi dan syariatisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya idealisasi Islam sama dengan usaha formalisasi Islam yang menghasilkan bangunan normative Islam yang eksklusif dan picik.

Usaha formalisasi Islam menurut Gur Dur disebabkan karena ummat Islam dihadapkan pada kenyataan timpang nya teori kapitalistis dan

sosialistis. Sehingga untuk memecahkan masalah ini, para pemikir Islam terangsang untuk menggagas "teori ekonomi Islam". Begitu juga dengan kegagalan ilmu pengetahuan barat, maka perlu disusun "Islamisasi ilmu dan teknologi". Salah satu jawaban atas semua permasalahan ini adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah untuk mengembalikan kejayaan Islam, zaman keemasan Islam yang disebut *ahd al salaf*.

Bagi Gus Dur, untuk menjadi muslim yang baik, seorang muslim kiranya perlu menerima prinsip-prinsip keimanan, menjalankan ajaran (rukun) Islam secara utuh, menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, menegakkan profesionalisme dan bersikap sabar menghadapi cobaan dan ujian. Sehingga, system Islami atau formalisasi tidak menjadi syarat untuk mendapat predikat sebagai Muslim yang taat.

Dalam konteks ideologisasi, ideologisasi Islam sudah tidak sesuai dengan perkembangan Islam Indonesia yang dikenal dengan "Negara Muslim Moderat". Islam muncul dalam kultural sehari-hari yang tidak berbaju ideologi. Hal ini mendorong umat Islam mengarah pada penafsiran tekstual dan radikal terhadap teks-teks keagamaan. Sehingga ada upaya dari berbagai pihak untuk menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif setelah Pancasila.

Disini juga Gus Dur menolak gagasan Negara Islam. Menurutnya; upaya-upaya untuk meng-Islam-kan dasar Negara dan mensyari'atkan peraturan-peraturan daerah (Perda) bukan saja a histories, tetapi juga bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Sikap ini didasari

dengan pandangan bahwa Islam sebagai jalan hidup (syari'at) tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara

Dasar yang dipakai oleh Gus Dur adalah; *Pertama*, bahwa Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian kepemimpinan. sebagai contoh pada masa *khalifa ar Rasyidin* pada saat pergantian kepemimpinan yang melalui proses penunjukkan. *Kedua*, besaran negara yang ideal kan oleh Islam, ukurannya tidak jelas. Negara yang diidealkan dalam konteks Negara-bangsa (*nation-state*) atau hanya Negara-kota (*city-nation*).

Ada dua paradigma pemikiran politik Islam di kalangan Muslimin dunia termasuk didalamnya adalah Gus Dur, yaitu substantive-inklusif dan legal eksklusif.

Paradigma pemikiran politik Islam yang substantive-inklusif ditandai dengan adanya keyakinan bahwa Islam sebagai agama tidak berumuskan konsep-konsep teoritis yang berhubungan dengan politik. Paradigma ini bercirikan; keperayaan yang tinggi terhadap Al-Qur'an bahwa tak satupun ayat dalam Al-Qur'an yang menekankan umat Islam untuk mendirikan Negara Islam, menyakini bahwa Nabi Muhammad mempunyai misi dakwah dan kebajikan bukan membangun kerajaan atau Negara, syari'at tidak dibatasi oleh Negara, dan menekankan manifestasi substansial dari nilai-nilai Islam (*Islamic Injunctions*) dalam aktivitas politik.

Sedangkan, paradigma legal eksklusif bercirikan; meyakini bahwa Islam bukan hanya agama melainkan sistem hukum yang lengkap dan ideology universal serta system yang paling sempurna dalam menyelesaikan permasalahan umat manusia. mewajibkan kaum Muslimin untuk mendirikan Negara Islam. Meyakini bahwa syariat harus menjadi fundamen dan jiwa dari agama dan Negara. Dan menunjukkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung menopang bentuk masyarakat Islam yang dibayangkan seperti mewujudkan System Politik Islam.

Dari kedua bentuk paradigma pemikiran tersebut, jelaslah tampaknya Gus Dur berada pada level pemikiran substantive-inklusif sebagaimana sikap penolakan Gus Dur terhadap formalisasi, ideologisasi, dan syariatisasi. Hal ini juga cukup menarik perhatian Jhon L. Esposito, guru Besar kajian agama dan hubungan internasional yang mempunyai pandangan tentang Gus Dur sebagai berikut:

Wahid believes that contemporary Muslims are at critical cross road. Two choices or fath confront them: to persue a traditional, legal formalistic Islam or to reclaim and refashion a more dynamic cosmopolitan, universal, pluralistic worldview. In contrast to many fundamentalistic today, he rejects that nation that Islam should form the basis for the nation-states political or legal system, a nation he characterizes as a Middle Eastern tradition, alien to Indonesia. Indonesian Muslims should apply a moderate, tolerant brand of Islam to their daily lives in a society where a Muslim and a non-Muslim are the same, a state in which religion and politics are separate. rejecting legal formalism or fundamentalism as an aberration and a major obstacle to Islamic reform and to Islams response to global change, Wahid has spend his life promoting the development of a multifaceted Muslim identity and a dynamic Islamic tradition capable of responding to the realities of modern life. Its cornerstones are free will and the right of all Muslim, both laity and religious scholars (*ulama*) to perpetual reinterpretation (*ijtihad*) of the Qur'an and tradition of the prophet in light of ever changing human stations (Jhon L. Esposito, 2002).

Tentunya pemikiran Gus Dur tersebut banyak mendapat protes, kritik, dari berbagai kalangan. tapi Gus Dur menganggap bahwa perbedaan itu merupakan sebuah rahmat yang harus di hormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar tidak ada pihak yang di rugikan atau tersinggung dengan kritik tersebut, baik yang melontarkan kritik maupun yang menjadi sasaran kritik. Sehingga terjadi sikap saling keberterimaan (*intersubjetif*).

Dalam hubungan inter-subjektif yang akan melahirkan keikhlasan yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Keikhlasan menurut Gus Dur adalah peleburan ambisi pribadi masing-masing kedalam pelayanan kepentingan seluruh bangsa. harus ada konsensus antara pemimpin dan ketundukan pada keputusan sang pemimpin dirumuskan. untuk melakukannya, diperlukan dua prasyarat sekaligus, yaitu kejujuran sikap dan ucapan yang disertai dengan sikap mengalah untuk kepentingan bersama.

2. Kajian Sosial Budaya

Budaya adalah salah satu kekuatan sejarah. Tetapi apa yang dimaksud dengan budaya tergantung dari *world view* si pendefinisi. Tentunya ini akan melahirkan sikap dan persepsi yang terfokus pada sederatan fenomena dan melupakan fenomena yang lain. Padahal dalam ranah budaya, banyak gejala dan praktik budaya yang tidak tersorot oleh *mainstream* keilmuan.

Selama ini, wacana budaya masih banyak yang terbatas pada dikotomi budaya tinggi-rendah, budaya nasional-asing, dan atau budaya local (Hikmat Budiman, 2001). Dikotomi inilah yang sering memihak atau mengunggulkan salah satu budaya dan menganggap budaya yang lain rendah dan dangkal nilai.

Kajian budaya atau *cultural studies* adalah gerakan keilmuan dan praksis kebudayaan yang bersifat eklektis. Clifford Geertz menganggap Kyai/ulama pesantren sebagai “makelar budaya” (*cultural broker*). karena melakukan fungsi *screening* bagi budaya di luar masyarakatnya. Namun hal ini dibantah oleh Hiroko Horikoshi dalam disertasinya berhasil membuktikan bahwa Kyai mengambil peranan sendiri dalam merumuskan gerak pembangunan ditempat mereka berada.

Dalam kehidupan empirik, banyak sekali budaya-budaya lokal yang mempunyai label atau identitas keagamaan yang sangat beraneka ragam di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kebudayaan tersebut lahir di dalam masyarakat *human culture interaction* yang hanya bisa di pacu oleh *culture events* .

Keanekaragaman budaya tersebut masih banyak di pengaruhi atau memakai literature Arab dan dikemas sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai seni Islam. seperti membaca *barzanji*, *hadrah*, dan sebagainya. Tapi ada juga budaya atau kesenian yang mempunyai makna yang sama tapi masih dipengaruhi oleh pengaruh lokal. Seperti pagelaran *kentrung* di magelang yang terkena radiasi kultur istana dari keraton Mataram.

Perkembangan terakhir yang cukup menggembirakan dalam nafas ke-Islam-an dari kesenian kontemporer dan modern saat ini. seperti lirik lagu-lagu religius oleh Bimbo dan sudah banyak diikuti oleh band-band modern saat ini seperti Ungu, Gigi, dan lain-lain yang menjadi konsumsi public pada saat bulan Ramadhan. Ini merupakan bagian terkecil ekspresi formal ber kesenian yang bernafaskan Islam.

Barometer utama untuk mengetahui kadar keIslaman dari ekspresi kesenian yang beraneka ragam tersebut adalah ketaatan asas/konsistensi ekspresi itu sendiri dalam panjang nafas ke-Islam-an, dan kesungguhan isi pesan yang dibawakan itu sendiri. Kita bisa melihat apakah seniman atau budaya kita sudah memenuhi barometer tersebut sehingga budaya atau kesenian tersebut dapat dikatakan bernafaskan Islam.

Di sinilah perlunya peringatan keras atas budaya yang terjadi melalui proses akulturasi yang dibawakan oleh kesenian tersebut. Seperti lagu-lagu religius yang banyak diputar saat bulan Ramadhan maupun lagu-lagu modern. Jangan sampai kesenian tersebut hanya menjadi komoditas ekonomi dan merusak hakekat dari lirik-lirik religius lagu tersebut. Sehingga tidak terkesan main-main atau *economic interest* belaka.

Perjumpaan (*encounter*) antara budaya tradisional dan modern yang berlanjut kearah "proses tawar menawar" (*trade off*) sering terasa aneh karena penampilannya tidak mengambil dari kedua budaya tersebut. Hal inilah yang sedang terjadi pada budaya kita yang menjadi kenyataan hidup

yang harus kita hadapi bukannya dihargai. seperti reaksi atau pagelaran 'ngebor' dari Inul Daratista.

Tentu kita masih ingat dengan beberapa peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu yaitu kasus Inul Daratista. Inul Daratista yang terkenal dengan goyang ngebornya yang telah mampu menggemparkan seluruh pelosok negeri bahkan luar negeri. Kontroversipun tidak terelakkan lagi. Banyak pihak yang mengutuk dan menghujat bahkan oleh temannya sesama seniman, tapi ada juga yang membela. Salah satu orang yang getol dalam melakukan pembelaan terhadap Inul adalah Gus Dur.

Kontroversi ini muncul dengan alasan budaya dan agama. Mereka yang menolak goyang Inul beranggapan bahwa goyang seperti itu tidak pantas untuk Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang masih menjunjung nilai-nilai budaya ketimuran. Tapi sebaliknya, Inul dan para pendukungnya (termasuk Gus Dur) menyatakan bahwa ini sebagai bentuk ekspresi seni dan bagian dari Hak Azasi Manusia (HAM).

Disisi lain, ada juga budaya yang dijadikan komoditas elit dan kekuasaan. Hampir di setiap event-event politik, tidak sedikit para elit dan penguasa menggunakan media seni dan budaya untuk menarik atau menjadi 'magnet' untuk mengerahkan massa pendukung. Kadang orang menyebutnya sebagai 'dagelan' politik untuk memenangkan pertarungan politik.

3. Keadilan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Pasca kemerdekaan tahun 1945 kebijakan ekonomi kita lebih berpihak pada kepentingan para pengusaha besar dan modern. Apalagi saat ini banyak sekali mafia-mafia atau brokers yang menggerogoti disekitar kita yang tanpa kita sadari memberi andil dalam memperparah kondisi perekonomian Indonesia. Arus perputaran uang, barang dan jasa hanya berputar pada level menengah atas. Sehingga tidak mengherankan kalau dunia usaha (bisnis) dikuasai oleh mereka yang sebagian besar didominasi oleh keturunan Tionghoa.

Kesenjangan kaya-miskin yang semakin besar, dibutuhkan sebuah penataan ekonomi bangsa kita. Data empiric menunjukkan bahwa apa-apa yang terbaik yang ada di negeri ini hamper dikuasai oleh golongan kaya, baik itu pribumi maupun dari keturunan Tionghoa. Sehingga para pribumi yang tidak/menguasai apa-apa selalu mengalamatkan bahwa kondisi perekonomian kita disebabkan oleh keturunan Tionghoa.

Pada pertengahan tahun 1997 negara Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat dahsyat yang bangsa ini terpuruk hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh pengaruh ekonomi global. Sebagai bangsa yang "sakit", tentu kita "berobat" ke "dokter" yang berkaitan dengan "penyakit" bangsa ini. Akhirnya bangsa kita menemukan sang "dokter" nya yaitu International Moneter Fund (IMF) yang 'mendiagnosa' Negara kita mengalami krisis ekonomi dan moneter. Sang "dokter"(IMF) memberikan 'obat' terhadap "penyakit" yang diderita oleh bangsa ini.

Tapi 'resep' yang diberikan tidak membuahkan hasil hingga saat ini. sehingga para ekonom nasional meminta Indonesia untuk keluar dari IMF karena telah memberikan 'diagnosa' dan 'obat' yang salah atas 'penyakit' krisis ekonomi dan moneter yang di alami bangsa ini. Hal senada juga pernah di lontar kan oleh Kwik Kian Gie (mantan Menko Ekuin RI) mengemukakan keinginannya agar Indonesia keluar dari IMF.

Pada saat ini, Gus Dur melontarkan gagasan akan keharusan untuk mempertahankan kompetisi, tata niaga internasional dan efisiensi yang rasional merupakan bagian yang harus dilakukan untuk sebuah kebangkitan ekonomi. Hal ini akan berdampak pada devisa Negara.

Dalam pandangan Islam, orientasi kepemimpinan terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Namun, kita sering terjebak pada pemikiran bahwa tingkat kesejahteraan rakyat hanya sebatas pemenuhan hidup dan kepemilikan belaka. Padahal menurut Gus Dur, kesejahteraan juga menyangkut kemerdekaan berbicara dan berpendapat, kedaulatan hokum dan perlakuan yang sama di hadapan undang-undang. Kesejahteraan ini juga menyangkut kebebasan berorganisasi, kebebasan rakyat dalam menentukan bentuk Negara yang diinginkan dan beberapa aspek kehidupan agar tercipta rasa keadilan.

Masalah kemiskinan di Negara ini menurut Gus Dur hanya dapat dipecahkan melalui upaya transformatif dalam lingkup makro. Yaitu dengan menegakkan demokrasi yang murni, mengembangkan lembaga kemasyarakatan yang adil di semua bidang dan menolak ketidakadilan

dalam segala bentuk. Agama Islam tidak bias lepas dari persoalan makro ini dan sikap mengabaikan hal ini berarti mengkhianati aspirasi Islam dalam arti penuh.

Tapi kenapa di negeri yang mayoritas beragama Islam dan terbesar di dunia, masih melakukan praktik-praktik ketidakadilan dalam segala aspek kehidupan dan terjadinya korupsi yang luar biasa di negeri ini. Semua krisis ini bermula dari krisis moral yang telah merambah seluruh lini kehidupan, mulai dari skandal ekonomi, KKN, social, politik, dan sebagainya. kita baru sadar bahwa segala krisis ini justru berawal dari pengenalan diri kita terhadap Tuhan.⁴⁷

⁴⁷Ahmad Afandi, *Pemikiran Abdurrahman Wahid Ilam dan Masalah-masalah Keummatan, Makalah*, 2007 (<http://Makalah.html>), diakses 31 Desember 2007

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa konsep pengembangan masyarakat Islam dalam modernisasi pesantren adalah bahwa pengembangan masyarakat merupakan proses atau cara untuk meningkatkan atau mengembangkan kualitas masyarakat Islam dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara umum pengembangan masyarakat harus dimulai dari pengembangan individu dengan cara mengembangkan sumberdaya manusianya. Pesantren merupakan lembaga pendidikan, sedangkan lembaga pendidikan itu adalah proses pembaharuan anak manusia untuk menjadi cita ideal dirinya sesuai perkembangan zaman. Dan menurut Abdurrahman Wahid Modernisasi pesantren harus dilakukan, antara lain dalam kerangka keteguhan iman, keseimbangan imtaq dan iptek, keberagaman ciri khas dan progam pendidikan, pemanfaatan watak kemandirian, dan ketajaman visi dalam membaca kebutuhan lingkungan.

Dalam hal ini menurut Abdurrahman Wahid, pola modernisasi pesantren harus mengedepankan:

1. Modernisasi pesantren harus tetap tertumpu pada asas keIslaman, dan dalam batas tertentu juga mempertahankan ciri khas tradisionalitasnya yang antara lain memuat nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, dan kemandirian.

2. Modernisasi pesantren harus berorientasi pada keseimbangan antara imtek dengan imtaq dalam arti yang seluas-luasnya.
3. Modernisasi pesantren seyogyanya tetap memberikan peluang terjadinya keberagaman masing-masing untuk dipertahankan ciri khas dan program pendidikannya, dalam arti tidak menggiring kearah pola yang seragam, dan katakanlah secara massal dijadikan bagian integral dari sistem pendidikan formal baik dalam wujud madrasah maupun sekolah umum.
4. Modernisasi pesantren seyogyanya dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin corak aslinya sebagai pendidikan mandiri, dalam arti tidak mengandalkan santrinya kelak menjadi pegawai pemerintah semata.
5. Modernisasi pesantren perlu dilakukan dalam keterkaitan eratnya dengan realitas dan kebutuhan lingkungan. Misalnya pesantren yang lokasinya di pedesaan, silahkan membuka program pendidikan., misalnya yang melahirkan santri trampil dalam bidang agro industri.

B. Saran

1. Diharapkan bagi lembaga pendidikan agama atau pesantren hendaknya melakukan pengembangan sesuai dengan pola yang ditunjukkan pada kesimpulan diatas.
2. Pengembangan pesantren tidak harus meninggalkan tradisi lama (*salaf*) karena hal itu bisa menjadi rem atau pengendali.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi Ahmad, *Pemikiran Abdurrahman Wahiddan Masalah-Masalah keUmmatan*, [http:// Makalah.co.id.html](http://Makalah.co.id.html), diakses 31 Desember 2007
- A'la, abd, *Perubahan Pesantren*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2006.
- Al-Zhastraw,Ng, *Gus Dur Siapa Sih Sampeyan?*, Jakarta : Erlangga, 1999
- Barton,Greeg, *Biografi Gus Dur*, Yogyakarta: LkiS, 2006.
- Khusnurridho dan M. Sulthon, *Manajemen Pesantren dalam Perspektif Global*, Yogyakarta : Laksbang Press, 2006.
- K.H Dharwis, Ellyasa (Ed), *Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta : LkiS, 2007.
- L, Setiana, *Tehnik Penyuluhan dan Pembangunan Masyarakat*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.
- Machendrawaty, Nanih & A. Safe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*, Bandung : PT. Rosdakarya, 2001.
- Madjid, Nur Kholis, *Permasalahan Umum yang dihadapi pesantren*, Bina pesantren, 2000.
- Marijan Kacung, dan Ma'mun M, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta : PT. Gramedia, 1999.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi PenelitianKualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nadhim, M dan Nurkholis, *Tarekat Pesantren dan Budaya Lokal*, surabaya : Sunan Ampel press, 1999.
- Nurjannah, *Kesehatan Mental*. Hand Out Mata kuliah, Yogyakarta : Fak. Dakwah UIN Suka, 2005.
- Qomar Mujamil, *Pesantren Dari Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Tolkhah, Imam dan Barizi, Ahmad, *Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Akar Tradisi*, Jakarta : PT Raja Grafiindo Persada, 2004.

Wahid Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta : LkiS, 2007.

Wahid Abdurrahman, *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah*, Yogyakarta : LkiS, 2007.

Haris Mukhlis, *Konsep Khittah Pesantren Perspektif K.H.R. As'ad Syamsul Arifin*, 2006 (<http://makalah.co.id.html>, diakses 1 Oktober 2007)

Zet Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.